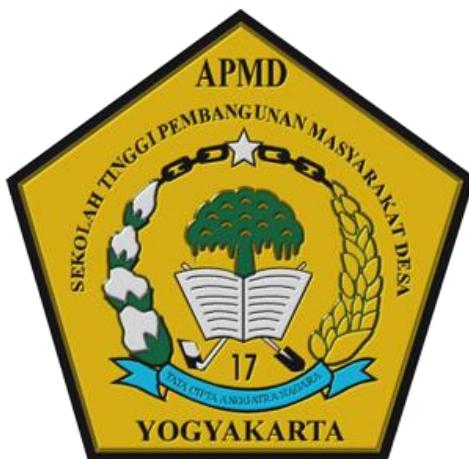


**PELAKSANAAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN ENDE**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**



disusun oleh :

**JOHN CHRYSOSTOMUS SADO
23610034**

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN
PELAKSANAAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN ENDE

Disusun Oleh
JOHN CHRYSOSTOMUS SADO

23610034

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Pada tanggal 26 Juni 2025

dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus

Nama

1. Dr. Gregorius Sahdan, M.A

Ketua/Pembimbing

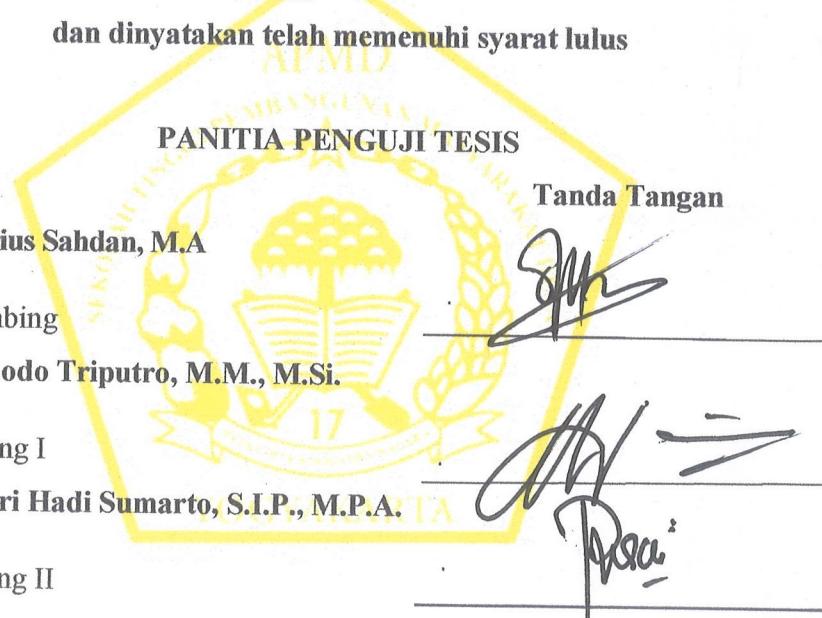
2. Dr. R. Widodo Triputro, M.M., M.Si.

Penguji Samping I

3. Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A.

Penguji Samping II

Tanda Tangan



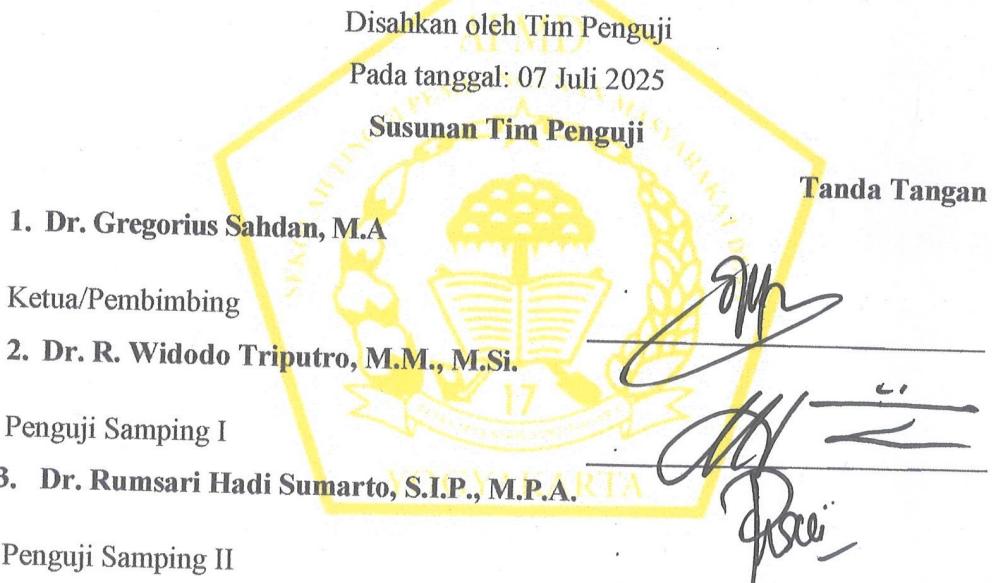
Mengetahui,
Plt. Direktur Program Pascasarjana
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A.

HALAMAN PENGESAHAN
TESIS
PELAKSANAAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN ENDE

Disusun Oleh
JOHN CHRYSOSTOMUS SADO
23610034



Mengetahui,
Plt. Direktur Program Pascasarjana
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : John Chrysostomus Sado

NIM : 23610034

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul PELAKSANAAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN ENDE adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 19 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



MOTTO

PERANKAN TUHAN SEBAGAI SUTRADARA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasihnya sehingga penulis diberi kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, yang saya cintai dan saya banggakan Bapak Cayertanus Geri dan Ibu Anastasia Seno yang memberikan ketulusan tanpa batas.
2. Kepada dosen pembimbing tesis saya Bapak Dr. Gregorius Sahdan, M.A. karena telah membimbing, mengarahkan dan membantu dengan sabar sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Kepada seluruh dosen pengampu atau pengajar di program Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” yang telah memberikan ilmu pengetahuan pengalaman dan inspirasi.
4. Kepada semua teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan angkatan 32.
5. Kepada seluruh informan yang telah membantu memberikan data, informasi kepada peneliti.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya yang berkelimpahan yang telah memberikan penulis kesehatan, keselamatan, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan tesis ini dengan judul Pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Ende. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister S2 Ilmu Pemerintahan pada Pascasarjana, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta. Dalam proses pembuatan tesis ini penulis menyadari bahwa berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto selaku ketua STPMD APMD Yogyakarta.
2. Direktur Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Bapak Dr. Sugiyanto, M.M.
3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, M.A. selaku dosen penguji, saya ucapkan terima kasih sedalam-dalam, karena telah membimbing, mengarahkan dan membantu dengan sabar sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. R. Widodo Triputro, M.M., M.Si. selaku Dosen Penguji I yang telah menyampaikan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis dalam memperbaiki cara penulisan tesis yang lebih baik.
5. Ibu Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A. selaku Dosen Penguji II yang telah menyampaikan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis dalam memperbaiki cara penulisan tesis yang lebih baik.

6. Pak Yohanes, Pak Deni, Pak Roman sebagai pegawai tata usaha Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa yang telah banyak membantu dalam hal memberikan informasi kepada penulis demi kelancaran pembuatan Tesis.
7. Kedua orang tua yang saya cintai dan saya banggakan Bapak Cayertanus Geri dan Ibu Anastasia Seno yang selalu memberikan ketulusan tanpa batas kepada saya. Kakak Frid Sado, Arjun Sado bersama istri, Adik Eky Sado, Novy One dan ponakan Qinan Sado yang selalu memberikan dukungan selama penulis menempuh studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.

Dalam melakukan penulisan dalam tesis ini, peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, serta masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Untuk itu penulis dengan senang hati menerima masukan baik berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kebaikan penulis dalam memperbaiki tesis ini.

Yogyakarta, Juni 2025

JOHN CHRYSOSTOMUS SADO

DAFTAR ISI

PELAKSANAAN	RENCANA	INDUK	PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN ENDE			i
HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN			ii
HALAMAN PENGESAHAN.....			iii
HALAMAN PERNYATAAN			iv
HALAMAN MOTTO			v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....			vi
KATA PENGANTAR.....			vii
DAFTAR ISI			ix
DAFTAR TABEL			xi
DAFTAR GAMBAR			xii
INTISAR			xiii
<i>ABSTRACT</i>			xiv
BAB I PENDAHULUAN			1
A. Latar Belakang			1
B. Kajian Literatur.....			10
C. Fokus Penelitian.			14
D. Rumusan Masalah.			14
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....			14
F. Kerangka Konseptual.			15
BAB II METODOLOGI PENELITIAN			34
A. Jenis Penelitian.			34
B. Lokasi Penelitian.			34
C. Sumber Data.			34
D. Teknik Pengumpulan Data.			35

E.	Teknik Pemilihan Informan.....	37
F.	Keabsahan Data.	38
G.	Teknik Analisis Data.	39
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN		40
A.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Ende	40
B.	Dinas Pariwisata Kabupaten Ende	41
C.	Tugas dan Fungsi.....	43
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		55
A.	Sumber Daya Manusia.....	55
B.	Pengembangan Bidang Industri.....	66
C.	Pengembangan Bidang Destinasi.....	79
D.	Pengembangan Bidang Pemasaran dan Promosi.	91
E.	Pengembangan Bidan Kelembagaan.....	96
BAB V PENUTUP		104
A.	KESIMPULAN.	104
B.	SARAN.....	106
DAFTAR PUSTAKA		107
LAMPIRAN-LAMPIRAN		115

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Informan Dan Jabatan	37
Tabel 3.1 Tugas dan Fungsi Aparatur Sipil Negara	43
Tabel 3.2 Data Kepegawaian.....	47
Tabel 3.3 Komposisi ASN dan PPPK.....	54
Tabel 4.1 Pengembangan SDM.....	56
Tabel 4.2 Data Sertifikasi SDM	58
Tabel 4.3 Data Pengembangan Industri	67
Tabel 4.4 Data Pengembangan Restoran	73
Tabel 4.5 Data Pengembangan Biro Agen	75
Tabel 4.6 Data Pengembangan Angkutan Wisata	76
Tabel 4.7 Data Pengembangan Destinasi	81
Tabel 4.8 Data Pengembangan Desa Wisata	97
Tabel 4.9 Data Pengadaan Kelompok Sadar Wisata	100

DAFTAR GAMBAR

Ganbar 4.1 Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Ende Dan UGM	60
Gambar 4.2 Pengembangan SDM Pengelola	65
Gambar 4.3 Akun Media Sosial Dinas Pariwisata Kabupaten Ende	92
Gambar 4.4 Kerja Sama Dinas Pariwisata Dengan Labuan Bajo	92
Gambar 4.5 Promosi Festival	95

Intisari

Pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Ende didasarkan pada potensi alam, budaya, dan sejarah yang kaya, yang mampu menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Kabupaten Ende memiliki berbagai destinasi wisata unggulan seperti Danau Kelimutu dan situs budaya tradisional yang perlu dikembangkan secara terencana agar dapat meningkatkan perekonomian lokal melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan industri, pengembangan destinasi, pengembangan promosi pasaran, dan pengembangan kelembagaan termuat dalam buku rencana induk pembangunan pariwisata (RIPPARD).

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Ende dilihat dari; pengembangan sumber daya manusia, pengembangan industri, pengembangan destinasi, pengembangan promosi pasaran, dan pengembangan kelembagaan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik analisis data menggunakan teknik interpretatif.

Berdasarkan analisis tersebut menemukan bahwa Pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Ende menunjukkan komitmen dan rencana strategis melalui pelatihan, pendidikan, dan kemitraan, namun tantangan kapasitas aparatur dan keberlanjutan program masih perlu diperkuat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi masyarakat dan aparatur agar dapat mengelola potensi pariwisata secara berkelanjutan dan efektif. Pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Ende telah dilakukan melalui peningkatan fasilitas dan promosi berbasis budaya lokal, namun masih menghadapi kendala infrastruktur, sumber daya manusia, serta kurangnya inovasi dan pemasaran internasional. Pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Ende berhasil memperkuat potensi unik melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta, serta fokus pada pelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun menghadapi tantangan akses dan infrastruktur, pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan tetap menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas pengalaman dan daya saing wisata. Strategi promosi pariwisata Kabupaten Ende masih perlu diperkuat melalui sistem digital yang terintegrasi dan peningkatan partisipasi masyarakat. Kendala utama meliputi minimnya pengikut media sosial dan belum adanya website resmi, yang menghambat akses informasi dan promosi yang efektif. Pengembangan kelembagaan kepariwisataan melalui legalisasi desa wisata dan pokdarwis mendukung pengelolaan yang berkelanjutan dan terorganisasi. Dukungan pemerintah dalam proses legalisasi ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan wisatawan terhadap potensi pariwisata daerah.

Kata Kunci: RIPPARD, Pengembangan, dan Pariwisata

Abstract

The implementation of the Tourism Development Master Plan in Ende Regency is based on the rich natural, cultural, and historical potential, which can be the main attraction for tourists. Ende Regency has various leading tourist destinations such as Lake Kelimutu and traditional cultural sites that need to be developed in a planned manner in order to improve the local economy through human resource development, industrial development, destination development, market promotion development, and institutional development contained in the tourism development master plan book (RIPPARDA).

This study aims to describe the implementation of the Tourism Development Master Plan in Ende Regency in terms of; human resource development, industrial development, destination development, market promotion development, and institutional development. Data collection techniques through observation, interviews and documents. The method used in this study is descriptive qualitative. Data analysis techniques use interpretive techniques.

Based on the analysis, it was found that Human resource development in Ende Regency shows commitment and strategic plans through training, education, and partnerships, but the challenges of apparatus capacity and program sustainability still need to be strengthened. These efforts are expected to improve the competence of the community and apparatus so that they can manage tourism potential sustainably and effectively. The development of the tourism industry in Ende Regency has been carried out through improving facilities and promotions based on local culture, but still faces obstacles in infrastructure, human resources, and a lack of innovation and international marketing. The development of tourist destinations in Ende Regency has succeeded in strengthening unique potential through collaboration between the government, community, and private sector, and focuses on cultural preservation and environmental sustainability. Despite facing challenges in access and infrastructure, integrated and sustainable management remains a priority to improve the quality of tourism experiences and competitiveness. Ende Regency's tourism promotion strategy still needs to be strengthened through an integrated digital system and increased community participation. The main obstacles include the lack of social media followers and the absence of an official website, which hinders access to information and effective promotion. The development of tourism institutions through the legalization of tourist villages and pokdarwis supports sustainable and organized management. Government support in this legalization process is important to increase public and tourist trust in the potential of regional tourism.

Keywords: RIPPARDA, Development, and Tourism

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepariwisataan merupakan sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, merupakan dasar hukum yang mengatur pengembangan, pengelolaan, dan pelaksanaan kepariwisataan di Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 pasal 7 ayat a terdapat 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) (Setya 2017).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dalam pasal 8 yang menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi, dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten atau Kota. Rencana induk merupakan dokumen strategis yang menetapkan arah kebijakan jangka panjang suatu pembangunan atau pengembangan secara berkelanjutan.

Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu daerah yang ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Kabupaten Ende menjadi salah satu kabupaten yang ditetapkan

dalam provinsi NTT untuk pengembangan destinasi pariwisata nasional dengan sebutan KSPN Ende Kelimutu. Kabupaten Ende, yang dikenal dengan keindahan alamnya, budaya yang kaya, serta situs sejarah seperti Kelimutu dan tradisi adat, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan di Nusa Tenggara Timur, sehingga harus dikelola secara berkelanjutan dan sesuai prinsip pelestarian.

Sebagai langkah strategis untuk mengembangkan potensi wisata secara terencana dan berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Ende menyusun buku Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ende 2014-2034 dengan visi terwujudnya Kabupaten Ende sebagai destinasi pariwisata berbasis budaya dan lingkungan, berdaya saing global, serta mampu mendorong pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Misi perencanaan strategis RIPPARDA Kabupaten Ende 2014-2034; (1) pengembangan destinasi Kawasan strategis pariwisata Ende Kelimutu dan sekitarnya dan kawasan pariwisata lain berwawasan budaya dan lingkungan yang menarik, mudah dicapai, aman, nyaman, serta mampu meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (2) pengembangan industri pariwisata yang mampu bersaing, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial budaya dan lingkungan alam. (3) pengembangan pemasaran yang sinergis unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara. (4) mewujudkan tata Kelola KSPN Ende Kelimutu dan sekitarnya

serta Kawasan pariwisata lainnya secara terintegrasi yang didukung oleh sumber daya manusia profesional.

Buku Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ende poin 1.6 tentang maksud dan tujuan penyusunan RIPARDA item ke 2 tentang merumuskan arah pengembangan kepariwisataan Kabupaten Ende 2014-2034 yang mencakupi; arah kebijakan pengembangan kepariwisataan daerah, strategi pengembangan kepariwisataan daerah, dan indikasi program setiap komponen pengembangan kepariwisataan daerah. Buku RIPARDA juga mencantumkan pengembangan perwilayaan pariwisata Kabupaten Ende. Pengembangan perwilayahannya pariwisata di Kabupaten Ende bertujuan untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata melalui pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan. Strategi tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, melalui strategi pengembangan wilayah KSPN Ende-Kelimutu, kawasan Maurole, Detukeli Wewaria, kawasan Kota Baru Lepembusu Kelisoke, kawasan Lio Timur Ndori, Kawasan Ende Nangapanda, Pulau Ende, dan Maukaro.

Arah kebijakan dalam RIPARDA tentang peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam kepariwisataan dicapai dengan strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas organisasi dan sumber daya pengelola pariwisata. Strategi pengembangan sumber daya manusia sebagai pengelola pariwisata sangat penting karena dengan peningkatan kompetensi dan pengetahuan, kualitas layanan yang diberikan kepada wisatawan

dapat meningkat secara signifikan, sehingga dapat meningkatkan daya saing destinasi wisata. Selain itu, pengembangan sumber daya yang berkelanjutan juga membantu menjaga keberlanjutan ekosistem pariwisata dan mendorong inovasi dalam pengelolaan destinasi. Supriyanto (2019) mendefenisikan bahwa pengembangan sumber daya manusia yang efektif merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan keberhasilan pembangunan pariwisata secara umum. Oleh karena itu, strategi pengembangan sumber daya manusia harus dirancang secara sistematis agar mampu mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor pariwisata secara menyeluruh (Rahayu 2019).

RIPPARDA Kabupaten Ende meliputi pengembangan kepariwisataan dengan kebijakan dan strategi pengembangan destinasi, industri, pemasaran dan kelembagaan pariwisata. Arah strategi tersebut dijabarkan dalam strategi pengembangan yang diimplementasikan melalui program pengembangan kepariwisataan yang berkesinambungan, Pengembangan destinasi pariwisata dalam RIPPARDA Kabupaten Ende difokuskan pada peningkatan daya tarik dan infrastruktur destinasi yang ada, serta pengembangan destinasi baru yang memiliki potensi wisata. Strategi tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas objek wisata, pelestarian budaya dan lingkungan, serta penataan kawasan wisata agar nyaman dan aman bagi pengunjung. Strategi tersebut bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang berkesan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara berkelanjutan, melalui

kebijakan daerah, keberlanjutan dan pelestarian budaya menjadi aspek utama dalam pengembangan destinasi agar tetap lestari dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional (Putra 2020).

Pengembangan industri pariwisata dalam rencana pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha dan kegiatan ekonomi yang berbasis pada sektor pariwisata, seperti penginapan, kuliner, kerajinan tangan, serta jasa wisata lainnya. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memperkuat ekonomi lokal melalui pemberdayaan pelaku usaha dan penciptaan lapangan kerja baru. Program tersebut mendorong inovasi dan peningkatan mutu produk serta layanan agar dapat memenuhi standar internasional dan menarik minat wisatawan dari berbagai kalangan. Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memperkuat ekosistem industri pariwisata secara regional (Dewi 2019).

Pemasaran pariwisata merupakan salah satu aspek krusial dalam rencana pengembangan destinasi yang bertujuan untuk mempromosikan lokasi secara efektif dan berkelanjutan. Melalui pemanfaatan pemasaran digital, promosi melalui media sosial, serta kerja sama dengan agen perjalanan, target pasar dapat dijangkau dengan lebih luas dan efisien. Strategi tersebut juga meliputi penguatan citra destinasi dan pengembangan branding yang mencerminkan keunikan dan kekhasan destinasi tersebut, sehingga mampu menarik wisatawan dari dalam dan luar negeri. Dengan penerapan pemasaran yang tepat, destinasi dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata secara konsisten dan

memperluas jangkauan pasar (Saraswati 2021).

Kelembagaan dalam pengembangan pariwisata diarahkan pada penguatan struktur organisasi dan peningkatan kapasitas lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan destinasi wisata. Upaya tersebut meliputi pelatihan sumber daya manusia, peningkatan koordinasi antar instansi terkait, serta pengembangan sistem manajemen yang efisien dan transparan. Kelembagaan yang kokoh akan menjamin pelaksanaan kebijakan dan program berjalan sesuai dengan rencana dan mampu mengatasi berbagai tantangan yang muncul, dengan penguatan kelembagaan, pengelolaan destinasi wisata dapat dilakukan secara lebih profesional dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah tersebut (Lestari 2022).

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan merupakan bagian dari perbuatan pemerintah. Kebijakan yang dibuat merupakan tindakan nyata dari kekuasaan negara, melalui perilaku pemerintah atau *governing of the power* dengan tujuan melindungi masyarakat (*power to*), menyelamatkan masyarakat (*power over*), memberdayakan masyarakat (*power to empowerment*), membangun relasi atau kerja sama (*power to relation*), dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (*power to service delivery*). Perilaku pemerintah dengan membuat kebijakan untuk mengantisipasi ancaman eksternal dan internal, melindungi masyarakat dari kelaparan, kemiskinan, kekerasan, dari situasi dan kondisi internal yang kurang menguntungkan (Sahdan et al., 2024).

Pemerintah pusat menetapkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan nasional yang mengatur berbagai aspek kepariwisataan, hak dan kewajiban, pengembangan, dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan citra bangsa melalui pariwisata. Strategi pemerintah secara nasional dilatarbelakangi bahwa pariwisata merupakan salah satu penyumbang devisa terbanyak bagi daerah. Pengembangan kepariwisataan nasional dengan berfokus pada peningkatan daya saing dengan sistem keberlanjutan melalui digitalisasi, termasuk pengembangan destinasi baru, infrastruktur, promosi dan penguatan administrasi kelembagaan kepariwisataan.

Kebijakan pemerintah didasari analisis yang mendalam dalam menetapkan suatu kebijakan publik. Gambaran kebijakan publik mencerminkan pemahaman pemerintah dalam sistem pelayanan dan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi dan keadilan. Kolaborasi dan kerja sama merupakan strategi awal dalam perbuatan pemerintah untuk menetapkan kebijakan publik. Perwujutan misi pembangunan dengan melibatkan perencanaan strategis, kordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan pemantuan secara berkelanjutan (Nikodimus, n.d. 2023).

Kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui kebijakan pengembangan pariwisata menjadi pedoman nasional dalam implementasi kebijakan di daerah.

Penyelenggaraan kebijakan publik yang dilakukan Pemerintah Daerah tidak jauh berbeda dengan aturan yang ditetapkan pusat. Pariwisata menjadi salah satu fokus pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada setiap daerah. Indonesia dikenal dengan kekayaan alam, budaya dan sejarah yang menjanjikan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, pengembangan kepariwisataan di Indonesia dengan memanfaatkan keunikan sumber daya pada setiap daerah dengan prinsip keberlanjutan kepariwisataan jangkah panjang.

Dokumen RIPPDA (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah) merupakan alat penting bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan dan memperkuat sektor pariwisata secara berkelanjutan. RIPPDA berfungsi sebagai acuan strategis dalam pengambilan keputusan, pengembangan kebijakan, alokasi anggaran, serta investasi yang efisien dan efektif. Selain itu, dokumen tersebut menjadi panduan bagi pelaku usaha dalam menyesuaikan produk dan layanan wisata sesuai visi daerah, sekaligus menarik minat investor dan pelaku usaha sektor pariwisata. Melalui RIPPDA, daya saing pariwisata daerah dapat diperkuat, yang berdampak positif terhadap peningkatan kedatangan wisatawan, masa tinggal, dan belanja wisatawan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tidak kalah penting, RIPPDA juga memfasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan provinsi, sehingga tercipta sinergi yang mendukung pengembangan pariwisata secara berkelanjutan dan berorientasi pada manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan (Richard et al.

(2018).

Perbuatan pemerintah melalui pembangunan nasional mengacu pada serangkaian inisiatif pembangunan berkelanjutan yang mencakup masyarakat, bangsa, dan kehidupan nasional secara keseluruhan untuk melaksanakan tujuan nasional dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai suatu bangsa yang mengikat diri dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan pembangunan perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa kecuali. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (*facilitator* dan *dinaminator*) perwujudan tujuan nasional, dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah mewakili kepentingan rakyat di semua tingkatan (Yuliani 2023).

Pemerintah adalah suatu badan atau lembaga yang berwenang menjalankan kekuasaan dan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara melalui kebijakan pembangunan. Pemerintah melaksanakan kegiatan kelembagaan yang diungkapkan dengan menyampaikan kepentingan rakyat kepada pemerintah. Pemerintah dibentuk, melaksanakan kebijakan dan memantau pelaksanaannya. Berbagai tindakan pemerintah diharapkan dapat mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. (Thahir 2019).

Penelitian ini penting dilakukan karena menilai sejauh mana rencana strategis tersebut telah diimplementasikan dan memberikan dampak nyata terhadap pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Ende, dengan melakukan penelitian ini, dapat diidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan RIPPDA, sehingga langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat dirancang untuk meningkatkan efektivitasnya. Selain itu, penelitian ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Ende mampu bersinergi dengan konsep keberlanjutan.

B. Kajian Literatur

Dalam penelitian ini, penulis memakai beberapa acuan dari hasil penelitian tentang pariwisata yang dilakukan peneliti lainnya, yaitu;

1. Kajian yang dilakukan oleh Sefriameli dengan judul Implementasi Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam Tahun 2023 menunjukan bahwa kebijakan dan regulasi Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pariwisata Linggai sebagai acuan dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata, dalam implementasinya belum efektif karena beberapa faktor seperti; promosi yang masih minim dan kendala aksesibilitas dan sarana prasarana di sekitar objek wisata Linggai (Sefriameli, 2023),

<https://journal.lembagakita.org/index.php/jemsi/article>

[/view/1612/1106](#)

2. Kajian yang dilakukan oleh Vinata dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah Tahun 2023 menunjukkan bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah provinsi Bengkulu berjalan sesuai arah dan strategi utama yang melibatkan semua stakeholder terkait (Vinata, 2023)
<http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/2501/>.
3. Kajian yang dilakukan oleh Wan Asrida dengan judul Pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2010-2015, Tahun 2018, menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2010-2015 masih kurang baik, karena kurangnya kerja sama antara pemerintah dan swasta masih belum terlaksana secara signifikan (Asrida, 2018)
<https://media.neliti.com/media/publications/205260-pelaksanaan-rencana-induk-pembangunan-ke.pdf>
4. Kajian yang dilakukan oleh Suwarno dengan judul Implemntasi Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2014-2029 Tahun 2017 menunjukkan bahwa Implementasi

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2014-2029 dalam program pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, menunjukkan bahwa belum terpenuhi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta belum memadai sumber daya manusia dalam pengelolaan objek wisata (Suwarno, 2017)

<https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/1679>

5. Kajian yang dilakukan oleh Dwi Yuly Sulistyorini dengan judul Pengembangan Potensi Pariwisata untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Pasal 9 Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi) Tahun 2018, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, seperti Pantai Grand Watu Dodol, dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi jasa usaha (Sulistyorini, 2018)
<https://core.ac.uk/download/pdf/290399163.pdf>
6. Kajian yang dilakukan oleh Della Prabaningsiwi dengan judul Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Di

Sektor Pariwisata Untuk Meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Madiun Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2025, Tahun 2018 menunjukan bahwa Pengembangan pariwisata di Kabupaten Madiun bertujuan meningkatkan PAD melalui kerja profesional Disparpora dalam mengatasi hambatan dan memanfaatkan faktor pendukung, seperti letak geografis dan keberagaman budaya (Prabaningsiwi, 2018)

<https://dspace.uji.ac.id/handle/123456789/9916>

7. Kajian yang dilakukan Mohamad Rifan dengan judul Disharmonisasi Periode Pemberlakuan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Di Indonesia (Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan) Tahun 2020, menunjukan bahwa kebijakan dan regulasi sangatlah penting dalam acuan dan pedoman pelaksanaan pengembangan kepariwisataan secara efektif dan berkelanjutan (Rifan,2020)<https://ejurnal.kemenparekraf.go.id/index.php/jki/article/view/165>.

Ketujuh peneliti terdahulu terkait pelaksanaan rencana induk kepariwisataan di Indonesia secara umum, perbedaan utamanya adalah peneliti kali ini meneliti Pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten

Ende dilihat dari pengembangan sumber daya manusia, pengembangan destinasi, pengembangan industri, pengembangan pemasaran, dan pengembangan kelembagaan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Ende, dilihat dari;

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Pengembangan Destinasi
3. Pengembangan Industri
4. Pengembangan Pemasaran
5. Pengembangan Kelembagaan

D. Rumusan Masalah

Pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Ende”?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah;

Tujuan Penelitian

1. Menggambarkan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Ende.

2. Menggambarkan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan destinasi, pengembangan industri, pengembangan pemasaran, dan pengembangan kelembagaan dalam pelaksanaan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Ende.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat dari penelitian ini adalah supaya masyarakat mengetahui terkait Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Ende.
2. Supaya masyarakat mengetahui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan destinasi, pengembangan industri, pengembangan pemasaran, dan pengembangan kelembagaan dalam pelaksanaan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Ende.

F. Kerangka Konseptual

1. Kepariwisataan

Kepariwisataan merupakan salah satu sektor penting yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di berbagai daerah. Menurut Cooper et al. (2008), kepariwisataan dapat dipahami sebagai kegiatan perjalanan dan kunjungan yang dilakukan oleh individu atau kelompok ke tempat-tempat di luar lingkungan sehari-hari untuk tujuan rekreasi, bisnis, atau lainnya, selama tidak melebihi satu tahun. Konsep tersebut menekankan aspek

pengalaman, budaya, dan keberlanjutan sebagai bagian utama dari pengembangan destinasi wisata. Oleh karena itu, kepariwisataan tidak hanya sebatas kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi wahana untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam kepada masyarakat luas (Ginting et al., 2020).

Selain itu, kepariwisataan juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang sangat penting. Menurut Smith (2009), keberhasilan pengembangan kepariwisataan sangat bergantung pada pelestarian budaya lokal dan adaptasi masyarakat terhadap pengaruh luar. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa kepariwisataan harus mampu memberi manfaat langsung kepada masyarakat setempat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, sekaligus menjaga identitas budaya dan lingkungan, dengan kata lain, konsep keberlanjutan menjadi kunci utama agar aktivitas kepariwisataan dapat berlangsung secara jangka panjang tanpa merusak sumber daya alam maupun budaya yang ada (Nuryananda et al., 2023).

Pengembangan kepariwisataan harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen yang efisien dan berorientasi pada keberlanjutan. *According to Timothy* (2011) mendefenisikan manajemen destinasi wisata yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, koordinasi antar stakeholder, serta pengembangan sistem yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat lokal, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,

dengan demikian, konsep kepariwisataan yang berkelanjutan menuntut kolaborasi dan pengelolaan sumber daya secara cerdas agar mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak terkait. Pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan juga harus memperhatikan aspek budaya dan adat istiadat setempat, sehingga keberadaan destinasi tidak mengikis identitas kultural masyarakat. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan destinasi akan membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, sekaligus meningkatkan daya tarik wisata yang autentik dan berwawasan lingkungan (Faizal 2023).

2. Pembangunan Kepariwisataan

Pembangunan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan ekonomi, sosial, dan infrastruktur secara berkelanjutan. Menurut Smith (2012), pembangunan tidak hanya dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek distribusi pendapatan, pemerataan kesempatan, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Sementara itu, Sen (1999) menekankan bahwa pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kemampuan manusia, yaitu kemampuan individu untuk memilih dan menentukan hidupnya sendiri. Konsep tersebut menegaskan bahwa pembangunan harus mampu memberikan manfaat secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada aspek material, melainkan juga mencakup aspek sosial dan kemanusiaan secara adil dan berkelanjutan, dengan demikian, pembangunan

merupakan proses holistik yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, serta pelestarian lingkungan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat (Susanto 2015).

Pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan menempatkan kerja sama harmonis antara berbagai pemangku kepentingan sebagai fondasi utama, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan lembaga terkait. Prinsip dalam proses tersebut pelestarian sumber daya alam dan budaya menjadi hal yang sangat krusial agar potensi destinasi tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Pembangunan industri pariwisata perlu didukung oleh inovasi dan pengembangan layanan yang berkualitas, sedangkan destinasi harus dikelola secara berkelanjutan agar tetap menarik dan lestari. Selain itu, strategi pemasaran yang efektif dan promosi yang tepat sangat penting untuk menjangkau pasar global dan meningkatkan daya saing. Kelembagaan yang kuat juga diperlukan untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan seluruh kegiatan berjalan secara sinergis dan sesuai prinsip keberlanjutan, sehingga pembangunan kepariwisataan dapat berlangsung secara harmonis dan memberi manfaat jangka panjang bagi semua pihak.

Menurut Hall (2008), pembangunan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan nasional melalui pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan. Selain itu, kepariwisataan berfungsi sebagai media untuk memperkenalkan budaya dan warisan lokal kepada dunia, serta

meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi. Hall (2008) menambahkan bahwa manfaat kepariwisataan juga mencakup peningkatan peluang pendidikan dan pelestarian budaya, yang mendukung keberlanjutan sosial dan ekonomi.

Menurut Weaver (2006), prinsip keberlanjutan merupakan inti dari pembangunan kepariwisataan, di mana sumber daya alam dan budaya harus dilestarikan agar dapat dinikmati generasi mendatang. Prinsip keadilan sosial menekankan pentingnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan dan manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata. Pelestarian budaya dan lingkungan juga merupakan aspek penting, sebagaimana diungkapkan oleh Brunt (2005), yang menekankan perlunya menjaga identitas budaya dan ekosistem sebagai aset utama destinasi wisata (Wardana 2020).

Menurut Hall (1994), keberhasilan pembangunan kepariwisataan sangat bergantung pada kerjasama yang harmonis antara berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah memiliki peran utama dalam mengatur kebijakan, menyediakan regulasi yang mendukung, serta membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung destinasi wisata. Di sisi lain, sektor swasta bertanggung jawab terhadap inovasi produk, pemasaran, serta investasi yang akan meningkatkan daya saing destinasi. Masyarakat lokal juga memegang peranan penting, karena partisipasi mereka memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kelestarian budaya dan lingkungan setempat. Sinergi yang

efektif antara semua pihak tersebut sangat diperlukan agar pengembangan kepariwisataan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif jangka panjang.

Konsep pembangunan kepariwisataan dari segi industri menekankan pentingnya pengembangan berbagai sektor pendukung yang mampu meningkatkan kualitas layanan dan produk wisata. Menurut Cooper (2008), industri pariwisata mencakup berbagai kegiatan ekonomi seperti perhotelan, restoran, transportasi, dan jasa wisata lainnya yang saling terkait dan mendukung keberhasilan destinasi wisata. Pembangunan industri yang berkelanjutan harus memperhatikan inovasi, efisiensi, serta peningkatan kualitas agar mampu bersaing di pasar global dan memenuhi harapan wisatawan. Sementara itu, dari sisi destinasi, Lane (2000) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan destinasi tergantung pada pengelolaan sumber daya alam dan budaya secara berkelanjutan, serta pengembangan infrastruktur yang memadai untuk menarik dan mempertahankan kunjungan wisatawan.

Aspek pemasaran dan promosi, Keller (2012) menyarankan bahwa strategi promosi harus mampu menciptakan citra positif dan memperluas daya tarik destinasi melalui inovasi pemasaran digital dan pengalaman unik yang mampu bersaing di tingkat internasional. Pembangunan pasar promosi harus didukung oleh riset pasar yang mendalam agar target audiens dapat dijangkau secara efektif. Dari sisi kelembagaan, Hall (1994) menekankan bahwa keberhasilan

pembangunan kepariwisataan sangat tergantung pada keberadaan lembaga yang mampu mengatur, mengawasi, dan mengoordinasikan seluruh kegiatan terkait secara efektif. Kelembagaan yang kuat akan memastikan regulasi berjalan dengan baik dan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja secara sinergis demi keberlanjutan pembangunan pariwisata (Susanto 2015).

Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Ende menunjukkan penerapan prinsip-prinsip yang sejalan dengan konsep global, di mana keberlanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama. Destinasi wisata seperti Danau Kelimutu tidak hanya dikelola untuk menarik wisatawan, tetapi juga dijaga agar tetap lestari melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Pengelolaan destinasi dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek pelestarian alam dan budaya, serta pengembangan layanan berkualitas yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Selain itu, strategi pemasaran yang inovatif dan promosi berbasis digital digunakan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing destinasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Ende memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara adil, sekaligus menjaga identitas budaya dan ekosistem setempat. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan di Ende tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjaga keberlangsungan sumber daya alam dan budaya yang menjadi

daya tarik utama, serta menciptakan manfaat jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

3. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDa)

Berdasarkan perilaku pemerintah atau *governing* yang berorientasi pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, pemerintah menyusun Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPDa). Rencana tersebut merupakan dokumen strategis yang mengintegrasikan visi, misi, serta arah pembangunan jangka panjang daerah. RIPDa memuat berbagai program dan kegiatan yang dirancang secara komprehensif dan terukur, sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Rencana tersebut menjadi pedoman utama yang mengarahkan seluruh kegiatan pembangunan dan menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait.

Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPDa) merupakan dokumen strategis yang menjadi kerangka umum dalam perencanaan pembangunan jangka panjang di tingkat daerah. Menurut Syahdian (2017), RIPDa berfungsi sebagai pedoman utama dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi daerah, serta mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Syahdian menegaskan bahwa RIPDa harus bersifat komprehensif dan partisipatif agar mampu mengakomodasi potensi daerah secara menyeluruh (Mulyana 2018).

Sementara itu, Hasan (2019) menambahkan bahwa RIPDa merupakan dokumen perencanaan yang bersifat berkelanjutan dan berbasis data, yang mengarahkan seluruh proses pembangunan daerah secara terstruktur dan sistematis. Menurutnya, keberhasilan RIPDa sangat bergantung pada proses perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Mulyana (2018) menyatakan bahwa RIPDa harus mampu menjadi panduan dalam penentuan prioritas pembangunan, pengalokasian sumber daya, dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan daerah. Mulyana menekankan bahwa keberhasilan implementasi RIPDa akan menentukan capaian pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan (Deddy 2018).

RIPPARDa atau Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah merupakan dokumen strategis yang menjadi dasar bagi perencanaan jangka panjang pengembangan sektor pariwisata di suatu daerah, termasuk Kabupaten Ende. Konsep utama dari RIPPARDa adalah menciptakan sebuah kerangka kerja yang mampu mengarahkan pengembangan pariwisata secara berkelanjutan, memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara seimbang, dalam konteks Kabupaten Ende, pengembangan pariwisata harus didasarkan pada potensi alam dan budaya yang khas, seperti Danau Kelimutu dan keanekaragaman budaya lokal, dengan menerapkan prinsip RIPPARDa, pengelolaan destinasi wisata di daerah ini diarahkan tidak hanya pada peningkatan

kunjungan wisatawan, tetapi juga pada pelestarian kekayaan budaya dan kelestarian lingkungan sekitar. Hal ini penting agar kegiatan pariwisata tidak merusak ekosistem maupun mengikis identitas budaya lokal.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan mencakup strategi pengembangan sumber daya manusia, strategi pengembangan industri, strategi pengembangan destinasi, strategi pengembangan pasaran, dan strategi pengembangan kelembagaan. Arah kebijakan peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam kepariwisataan dicapai dengan strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas organisasi dan sumber daya manusia pengelola destinasi pariwisata dijabarkan dalam program;

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya pengelolah pariwisata melalui pengembangan lembaga desa wisata, peningkatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pengelolah desa wisata, peningkatan kualitas kelompok sanggar seni budaya, kelompok pengrajin tenun ikat, anyaman, souvenir, serta pengrajin makanan dan minuman yang berbasis bahan pangan lokal sebagai pendukung keberadaan desa wisata dikordinasikan oleh dinas pariwisata Kabupaten.
2. Penguatan kelompok sadar wisata, TMO Kelimutu, Dmo Flores dan pengelolah destinasi pariwisata melalui upaya penguatan dan peningkatan kelompok sadar wisata sebagai sebuah program.

3. Pengembangan strategi SDM melalui pelaksanaan sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme karyawan sesuai standar.

Strategi mengembangkan destinasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pendukung destinasi pariwisata dijabarkan dalam program:

1. Peningkatan kuantitas fasilitas pendukung destinasi pariwisata (ketersediaan air bersih, listrik, komunikasi, tempat parkir, rest area, toilet umum, tempat parkir, puskesmas dan sarana ibadah);
2. Peningkatan kualitas layanan fasilitas pendukung destinasi pariwisata (ketersediaan air bersih, listrik, komunikasi, tempat parkir, rest area, toilet umum, tempat parkir, puskesmas dan sarana ibadah)
3. Peningkatan destinasi baru di wilayah pengembangan pariwisata.
4. Peningkatan pelayanan perbankan kepada wisatawan dengan menyiapkan fasilitas ATM, kartu kredit dan e-money yang lebih banyak dan tersebar merupakan program jangka panjang. Program ini dikoordinasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan pihak Bank BNI, BRI, Bank Danamon, dan Bank Mandiri.

Strategi mengembangkan fasilitas wisata MICE lokal dan regional bersinergi dengan wisata kota dijabarkan dalam program; Program ini berfokus pada pengembangan fasilitas pertemuan dan pameran berskala lokal dan regional. Strategi peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan informasi pariwisata meliputi penyediaan

papan informasi, peta daya tarik wisata, penunjuk arah, dan pengembangan pelayanan informasi berbasis IT.

Rencana pengembangan industri pariwisata melalui strategi dan program seperti peningkatan kualitas dan daya saing industri pariwisata, sekaligus memperkuat daya tarik destinasi lokal. Dengan fokus pada pengembangan aspek-aspek unggulan, kebijakan ini bertujuan menciptakan pengalaman wisata yang lebih menarik dan berkualitas tinggi, sehingga mampu menarik lebih banyak kunjungan domestik maupun mancanegara serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, strategi yang diterapkan meliputi pengembangan industri kreatif dan sektor pariwisata secara sinergis. Program-program konkret yang dilaksanakan meliputi pengembangan industri makanan tradisional sebagai objek wisata, peningkatan kualitas industri rumah budaya, pengipan, serta pengembangan kerajinan tangan lokal. Melalui inisiatif ini, diharapkan destinasi lokal dapat memperkaya daya tariknya sekaligus memperkuat identitas budaya yang unik dan berkelanjutan.

Selanjutnya pengembangan jaringan industri, fokus utamanya adalah pengembangan jejaring (networking) antar industri pariwisata. Rencana tersebut mencakup pengembangan jejaring di berbagai sektor industri pariwisata, seperti akomodasi, makan dan minum, destinasi pariwisata, transportasi darat, dan industri kreatif. Tujuan dari pengembangan jejaring ini adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha, serta meningkatkan kerjasama promosi pariwisata.

Rencana Pengembangan Pemasaran Pariwisata, melalui strategi pengembangan pemasaran pariwisata dengan melakukan kerja sama BPMPD, dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, serta Balai Taman Nasional Kelimutu. Strategi utama dalam pengembangan pasaran pariwisata berfokus pada peningkatan promosi dan pemasaran destinasi secara efektif, baik melalui media digital maupun tradisional. Penggunaan platform media sosial dan website resmi menjadi alat penting untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk segmen wisatawan internasional dan domestik. Selain itu, menjalin kemitraan dengan agen perjalanan, operator tur, dan komunitas lokal juga menjadi bagian dari strategi untuk memperluas jejaring pemasaran dan meningkatkan visibilitas destinasi wisata.

Program-program yang dijalankan dalam rangka mendukung pengembangan pasaran pariwisata meliputi pelatihan dan pemberdayaan pelaku industri pariwisata agar mampu memberikan layanan berkualitas tinggi dan menarik. Selain itu, penyelenggaraan event-event promosi dan festival budaya secara rutin bertujuan menarik perhatian wisatawan dan meningkatkan kunjungan ke destinasi tertentu. Pengembangan paket wisata yang inovatif dan bersinergi dengan kegiatan promosi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing pasar pariwisata secara berkelanjutan.

Rencana Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan yang merupakan bagian dari Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah melalui pengembangan kebijakan yang mendukung iklim investasi dan usaha pariwisata yang berkelanjutan, meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sumber

daya manusia, peningkatan promosi, pengembangan kemitraan, dan pengembangan mekanisme pembiayaan pariwisata. Strategi dan program kelembagaan pariwisata difokuskan pada peningkatan koordinasi dan integrasi antar berbagai lembaga terkait, seperti dinas pariwisata, asosiasi industri, dan komunitas lokal, guna menciptakan ekosistem yang harmonis dan efisien. Salah satu program utama adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik dan inovatif. Selain itu, pengembangan sistem manajemen dan regulasi yang transparan serta berbasis teknologi menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan ekonomi serta pelestarian budaya dan lingkungan, salah satu langkah lainnya seperti urusan administrasi terkait desa wisata dan pokdarwis melalui surat keputusan.

Implementasi adalah tahap pelaksanaan dari rencana induk pembangunan daerah. Pada tahap ini, kebijakan dan program yang telah dirancang dalam RIPDa dioperasionalkan melalui berbagai kegiatan nyata di lapangan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada konsistensi dan komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip *governing*, termasuk pengelolaan sumber daya secara efisien, pengawasan, dan evaluasi secara berkelanjutan. Implementasi yang efektif akan mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan dalam rencana induk.

Menurut Drucker (2007), implementasi merupakan proses menerjemahkan strategi ke dalam tindakan operasional yang spesifik. Drucker menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komunikasi yang efektif, pengelolaan sumber daya, dan pengawasan yang ketat terhadap proses pelaksanaan. Drucker menyatakan bahwa "Tanpa implementasi yang baik, strategi hanyalah rencana yang tidak akan pernah terealisasi" (Drucker 2007).

Menurut Coulter (2018), implementasi adalah tahap di mana rencana strategis diubah menjadi tindakan nyata melalui pengelolaan sumber daya manusia dan proses penerapan strategi. Keberhasilan implementasi memerlukan koordinasi antar departemen, pengembangan kebijakan, serta pengukuran kinerja secara berkala untuk memastikan tujuan tercapai secara efisien dan efektif. Menurut Notoatmojo (2012), dalam konteks implementasi program kesehatan, keberhasilan sangat bergantung pada faktor sosial, budaya, dan partisipasi stakeholder. Notoatmojo menekankan bahwa "Implementasi harus dilakukan secara partisipatif dan adaptif terhadap kondisi lokal agar hasilnya optimal".

Konsep implementasi secara umum mencakup proses penerapan rencana atau strategi ke dalam tindakan nyata di lapangan yang melibatkan pengelolaan sumber daya manusia, material, dan keuangan secara efektif dan efisien. Implementasi tidak hanya sekadar menjalankan kegiatan sesuai rencana, tetapi juga memerlukan koordinasi antar bagian, pengawasan, serta penyesuaian terhadap situasi yang berkembang agar tujuan akhir

dapat tercapai secara optimal. Selain itu, keberhasilan implementasi juga bergantung pada komunikasi yang baik, motivasi tim, serta pengukuran kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, konsep implementasi menuntut adanya perencanaan yang matang, pengelolaan risiko, serta fleksibilitas dalam melakukan evaluasi dan penyesuaian selama proses berlangsung, agar hasil yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan (Notoatmojo 2012).

Konsep implementasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Ende menitikberatkan pada langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi dan tujuan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan terintegrasi. Implementasi dengan melibatkan pengelolaan sumber daya alam dan budaya secara optimal, peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung, serta promosi yang efektif untuk menarik wisatawan lokal dan internasional. Selain itu, keberhasilan implementasi juga memerlukan koordinasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, serta pengawasan secara berkala untuk menyesuaikan program sesuai dinamika perkembangan dan kebutuhan pasar. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa rencana strategis dapat dijalankan secara konkret di lapangan, menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan bagi Kabupaten Ende.

Menurut (Sahdan et al., 2024) Mendefenisikan bahwa kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah merupakan perbuatan kekuasaan atau perilaku pemerintah. *Governing* sering diterjemahkan sebagai pemeritahan. Ogbujah (2015) menjelaskan bahwa *governing* sebagai bentuk pemerintah yang bekerja untuk mencapai kebutuhan dan tuntutan masyarakat melalui organisasi atau negara tanpa diskriminasi. Selanjutnya Fasenfest mendefenisikan bahwa pemerintah sebagai sejumlah kontrol atau regulasi yang mengatur fungsi pemerintah. Fasenfest menjelaskan perbedaan antara istilah pemerintah dan tata kelola pemerintah. Pemerintahan: memiliki pengawas yang memerintah dirinya sendiri. Tata kelola adalah aktivitas pemerintahan. Barry Ferguson mendefinisikan kekuasaan pemerintahan sebagai tindakan pemerintah yang berkaitan dengan perekonomian di mana pemerintah memiliki monopoli atas banyak kegiatan, meskipun pemerintah hanya merupakan salah satu pesaing kegiatan ekonomi selain pelaku usaha dan masyarakat.

Sahdan (2024) mendefenisikan terdapat 5 tujuan perilaku pemerintah dalam membuat kebijakan publik antara lain; Pertama melindungi masyarakat (*power to*), kebijakan publik yang dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat dengan aturan pedoman dan standar dengan tujuan menjaga kesehatan, kesejahteraan, hak-hak warga masyarakat. Kedua menyelamatkan masyarakat (*power over*), Serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatasi masyarakat dalam masalah sosial, ekonomi, lingkungan dan mencapai tujuan kolektif. Ketiga memberdayakan masyarakat

(*power to empowerment*), orientasi utama dari kebijakan publik yang dirancang pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam menciptakan kondisi individu dan kelompok untuk mengembangkan potensi dalam bentuk partisipasi pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Keempat membangun relasi atau kerja sama (*power to relation*), kebijakan yang dirancang untuk membangun kerja sama dan relasi dalam perumusan dan implementasi yang melibatkan semua stakeholder untuk berinteraksi dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Kelima meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (*power to service delivery*), peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan perbuatan pemerintah melalui kebijakan publik, pelayanan yang signifikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga negara secara keseluruhan (Sahdan et al., 2024).

Ferguson mendefenisikan bahwa tindakan pemerintah (*governing*) harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang mampu menjaga keseimbangan kekuasaan serta memastikan ketertiban umum. Ferguson menekankan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola ekonomi dan masyarakat, namun harus dilakukan secara efektif dan tidak berlebihan agar tidak menghambat kebebasan individu maupun pertumbuhan ekonomi. Menurut Ferguson, pemerintah seharusnya bertindak sebagai regulator yang menyediakan infrastruktur dan perlindungan keamanan, sekaligus menegakkan hukum, tanpa terlalu ikut campur dalam aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat dan berkeyakinan bahwa intervensi pemerintah harus dibatasi dan

diarahkan untuk menjaga kestabilan, bukan untuk mengendalikan seluruh aspek kehidupan masyarakat (Ferguson , 2011).

Teori diatas menjelaskan bahwa perilaku pemerintah melalui kebijakan publik dengan tujuan dan strategi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara umum. Perilaku pemerintah melalui pelaksanaan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Ende merupakan strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mencapai kesejahteraan melalui aspek pariwisata, dengan keterlibatan masyarakat dan semua stakeholder dipandang sebagai strategi utama dalam mencapai tujuan kebijakan di suatu daerah. Perilaku pemerintah atau governing merupakan fondasi utama dalam proses pembangunan daerah. Ini mencakup sikap, kebijakan, dan tata kelola yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan strategis. *Governing* menentukan arah dan prinsip dasar yang akan diikuti dalam seluruh proses pembangunan, seperti transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Perilaku ini mencerminkan nilai-nilai dan filosofi yang dianut pemerintah sebagai penggerak utama pembangunan daerah.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif (Utama 2022). Penggunaan metode kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Ende, dilihat dari pengembangan sumber daya manusia, pengembangan destinasi, pengembangan industri, pengembangan pemasaran, dan pengembangan kelembagaan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, Kantor DPRD Kabupaten Ende dengan alasan pemilihan lokasi tersebut adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Ende merupakan OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pariwisata dan DPRD Komisi 3 yang membahas terkait bidang kepariwisataan daerah.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder (Nazir 2011). Data primer adalah data berupa wawancara dan observasi peneliti terkait pelaksanaan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Ende dilihat pengembangan sumber daya manusia, pengembangan destinasi, pengembangan industri, pengembangan pemasaran, dan pengembangan kelembagaan. Data sekunder untuk mengumpulkan dokumen, laporan, jurnal,

statistik terkait pelaksanaan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Ende dilihat dari pengembangan sumber daya manusia, pengembangan destinasi, pengembangan industri, pengembangan pemasaran, dan pengembangan kelembagaan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga cara, yaitu: observasi, wawancara dan dokumen.

1. Observasi, digunakan untuk memperoleh data terkait pelaksanaan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Ende. Rahardjo (2011) menjelaskan observasi merupakan suatu kegiatan yang menggunakan panca indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah penelitian. Hasil observasi dapat berupa suatu kegiatan, kejadian, objek, situasi tertentu, atau emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata suatu peristiwa atau kejadian guna menjawab pertanyaan penelitian (Tambaru. 2025). Penulis melakukan observasi untuk memperoleh gambaran nyata dari pelaksanaan rencana induk dengan cara berdiskusi bersama anggota DPRD, masyarakat, dan melihat kondisi di sekitaran objek wisata.
2. Wawancara, digunakan untuk memperoleh data terkait pelaksanaan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Ende. Rahardjo (2011) mendefenisikan

wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab, dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, wawancara juga dapat dilakukan secara non-tatap muka, yaitu melalui media komunikasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam melibatkan keterlibatan langsung dalam kehidupan informan, menanyakan dan menjawab pertanyaan secara bebas dan rinci, memungkinkan informan merasa nyaman melakukan wawancara mendalam dan memberikan informasi secara bebas (Utama 2022). Penulis melakukan wawancara bersama perwakilan anggota DPRD komisi 3, kepala bagian industri, kepala bagian destinasi, kepala bagian promosi dan pasaran, ketua pokdarwis Detusoko Barat dan masyarakat.

3. Dokumen, digunakan untuk memperoleh data terkait pelaksanaan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Ende. Dokumen berupa catatan harian, catatan hukum atau peraturan, catatan penelitian, arsip foto, surat, catatan kegiatan. Dokumen merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam penelitian karena dapat dijadikan sebagai bukti faktual atas hasil suatu laporan penelitian (Marr 2022). Penulis menggunakan data dokumen seperti; peraturan daerah, peraturan bupati,

dan laporan akhir Tahun Dinas Pariwisata 2024.

E. Teknik Pemilihan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*. Menurut Sugiyono teknik *purposive* melibatkan pemilihan informan yang dianggap memiliki pemahaman mendalam tentang topik penelitian dan dapat diandalkan sebagai sumber informasi yang akurat. Selanjutnya Sugiyono menjelaskan teknik *snowball*, dimana penulis mendapatkan data dari pihak lain selain responden utama yang dianggap memiliki pemahaman mendalam terkait topik penelitian, wawasan luas mengenai subjek yang tengah diselidiki dan diandalkan sebagai sumber informasi yang akurat, dan sesuai dengan lingkup penelitian (Ajif 2018).

Tabel 2.1

Daftar Informan dan Jabatan

No	Nama	Jabatan	Alasan Memilih Informan
1	Vinsensius Sanggu	DPRD Kabupaten Ende	Untuk mengetahui kebijakan dan regulasi pembangunan pariwisata.
2	Rosalia Juditia Embu Rae	Kepala Bagian Industri	Untuk mengetahui implementasi kebijakan dan regulasi terkait industry.
3	Patrisia Diana Mbenggu	Kepala Bagian Destinasi	Untuk mengetahui Implementasi terkait destinasi.

4	Viktor Pera	Kepala Bagia n Promosi d an Pasaran	Untuk mengetahui implementasi terkait promosi dan pasaran.
5	Lensi Dadi	Ketua Pokdarwis Desa Detusoko Barat	Untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan.

F. Keabsahan Data

Penulis melakukan beberapa tahapan dalam keabsahan data seperti uji derajat kepercayaan, dalam tahap ini penulis memastikan bahwa data yang ditemukan benar-benar menggambarkan kondisi yang ada di lapangan seperti; pengembangan sumber daya manusia, pengembangan destinasi, pengembangan industri, pengembangan pemasaran, dan pengembangan kelembagaan. Selanjutnya tahap uji keteralihan penulis melakukan pengujian apakah data yang digunakan konsisten, relevan, dan sesuai dengan perencanaan strategi dalam buku induk pembangunan seperti; rencana strategi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan destinasi, pengembangan industri, pengembangan pemasaran, dan pengembangan kelembagaan. Uji kebergantungan penulis memastikan bahwa variabel-variabel yang ada saling bergantung dan menunjukkan hubungan yang signifikan seperti strategi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan destinasi, pengembangan industri, pengembangan pemasaran, dan pengembangan kelembagaan. Uji kepastian penulis

memastikan bahwa pelaksanaan rencana induk sesuai dengan misi pencapaian yang telah direncanakan dalam RIPPARDA (Ajif 2013).

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan teknik interpretatif. Teknik interpretatif menurut Newman (1997), adalah pendekatan kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam dan makna dari konteks data melalui tahap seperti; (1) Reduksi data, adalah suatu proses yang selektif, terfokus pada penyederhanaan, pada tahap ini penulis memisahkan data observasi, wawancara dan dokumen yang tidak digunakan dan digunakan sebagai bahan analisis. (2) Display data, adalah tahap dalam analisis data kualitatif yang berupa penyajian data, penulis melakukan penyajian seperti data tabel destinasi, tabel industri, bagan struktur organisasi, tabel agen wisata, dan bagan jumlah pengunjung. (3) Verifikasi data adalah memastikan kebenaran dan keakuratan data, penulis melakukan cross cek data dari sumber yang berbeda seperti data dokumen terkait pengembangan destinasi, industri (4) Analisis data, penulis melakukan analisis data observasi, wawancara, dokumentasi untuk menjawab rumusan masalah (Chen 2009).

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Ende

Pemerintah daerah Kabupaten Ende aktif merancang dan melaksanakan berbagai inisiatif untuk mengembangkan sektor pariwisata, termasuk memperbaiki dan membangun destinasi wisata, meningkatkan fasilitas infrastruktur, melakukan kegiatan promosi secara luas, serta memberdayakan masyarakat setempat agar turut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata. Proses pembangunan pariwisata tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti dinas pariwisata, pemerintah desa, komunitas lokal, pengusaha di bidang pariwisata, serta organisasi masyarakat, yang secara bersama-sama berkontribusi dalam pelaksanaan program tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten setiap tahun sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun oleh pemerintah daerah guna memastikan kemajuan dan keberlanjutan sektor pariwisata di Kabupaten Ende. Lokasi utama pengembangan pariwisata mencakup seluruh wilayah Kabupaten Ende, dengan fokus utama pada daerah yang mempunyai potensi destinasi unggulan. Pentingnya pembangunan pariwisata oleh pemerintah daerah didasarkan pada manfaat yang diperoleh, seperti peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, pelestarian budaya dan kekayaan alam, serta pengenalan Kabupaten Ende kepada wisatawan dari berbagai daerah maupun mancanegara. Pelaksanaan pembangunan pariwisata dilakukan melalui penyusunan kebijakan, perencanaan tata ruang wilayah,

pengembangan sumber daya manusia, pembangunan fasilitas pendukung seperti akses jalan dan fasilitas umum, promosi melalui media massa dan digital, menjalin kerjasama dengan pihak swasta, serta melibatkan masyarakat lokal agar dapat aktif berpartisipasi dan merasakan manfaatnya.

B. Dinas Pariwisata Kabupaten Ende

Dinas Pariwisata Kabupaten Ende dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende dan Peraturan Bupati Ende Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ende. Berdasarkan kedua peraturan tersebut maka Dinas Pariwisata Kabupaten Ende berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, merupakan lembaga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam urusan kepariwisataan Kabupaten Ende. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014-2034, regulasi dan kebijakan tersebut membuat pengembangan kepariwisataan Kabupaten Ende terus berjalan. Tugas dan fungsi dalam perencanaan, pengembangan, promosi dan pengawasan, Dinas Pariwisata Kabupaten Ende memiliki

struktur organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi pada setiap kelembagaan yang mengurus kepariwisataan daerah. Tujuan dan visi misi yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata tentunya kolaborasi dan kerja sama bersama Organisasi Perangkat Daerah lainnya menjadi penting, dalam urusan kepariwisataan keterlibatan masyarakat lokal menjadi kunci utama pengembangan dan menjawab visi dan misi yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata.

Penyelenggaraan urusan pariwisata di Kabupaten Ende melibatkan pemerintah daerah dan berbagai pihak seperti pelaku usaha, masyarakat lokal, dan lembaga swasta. Pemerintah bertanggung jawab dalam mengatur kebijakan, pengembangan destinasi, dan promosi wisata agar mampu menarik wisatawan berkunjung dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan fasilitas dan infrastruktur penunjang seperti akses jalan, penginapan, serta pusat informasi wisata. Pelaksanaan kegiatan promosi dan event budaya secara rutin diadakan untuk meningkatkan daya tarik wisata di Ende.

Dalam pengelolaan pariwisata, pemerintah daerah juga menaruh perhatian besar terhadap pelestarian budaya dan lingkungan. Pemerintah mendorong pelaku usaha dan masyarakat untuk menjaga keaslian destinasi wisata dan mengurangi dampak negatif dari kunjungan wisatawan. Pengelolaan destinasi dilakukan secara berkelanjutan agar keindahan alam dan budaya tetap terjaga di masa mendatang. Selain itu, pelatihan layanan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas

agar pelayanan kepada wisatawan menjadi lebih baik.

C. Tugas dan Fungsi

Tabel 3.1

Tugas dan Fungsi Aparatur Sipil Negara di Dinas Pariwisata Kabupaten Ende

No	Jabatan	Tugas dan Fungsi
1	Kelapa Dinas	Mengembangkan, Mengkordinasi, Mengawasi, dan Evaluasi Pengembangan Pariwisata.
2	Sekretaris	Kepala Urusan Administrasi
3	Bagian Perencana	Perencana Pengembangan
4	Bagian Kepegawaian	Urusan Kepegawaian
5	Bagian Analisis Keuangan	Perencana, Analisis Keungan
6	Bendahara	Mengelola Keungan
7	Bidang Destinasi	Pengembangan Destinasi
8	Bidang Promosi	Pengembangan Promosi
9	Bidang Kelembagaan	Administrasi Objek Wisata
10	Bidang Industry	Pengembangan Industry
11	Ekonomi Kreatif	Pelaku Ekonomi
12	Analisis Objek Wisata	Pengembangan Objek Wisata
13	Pengelolah Usaha Pariwisata	Analisis Dan Strategi Usaha
14	Pemandu Wisata	Memandu dan Sumber Informasi

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Ende

Tujuan utama penyelenggaraan urusan kepariwisataan adalah peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Ende. Pada masa kepemimpinan Bupati Ir. Marselinus Petu 2014-2019 menempatkan pariwisata sebagai salah satu fokus pembangunan. Pada periode 2014-2019, masa kepemimpinan Bupati Ende Marselinus Petu menandai upaya strategis dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Ende dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dan promosi destinasi wisata unggulan. Pemerintah daerah berupaya mengembangkan potensi wisata alam, budaya, dan sejarah untuk menarik lebih banyak pengunjung lokal maupun mancanegara. Menariknya pada masa kepemimpinanya selalu mengadakan upacara Taga Kamba atau potong kerbau yang dilaksanakan setiap Tahun di Danau Kelimutu. Strategi tersebut tentunya sebagai salah satu cara mempromosikan budaya yang ada di Kabupaten Ende.

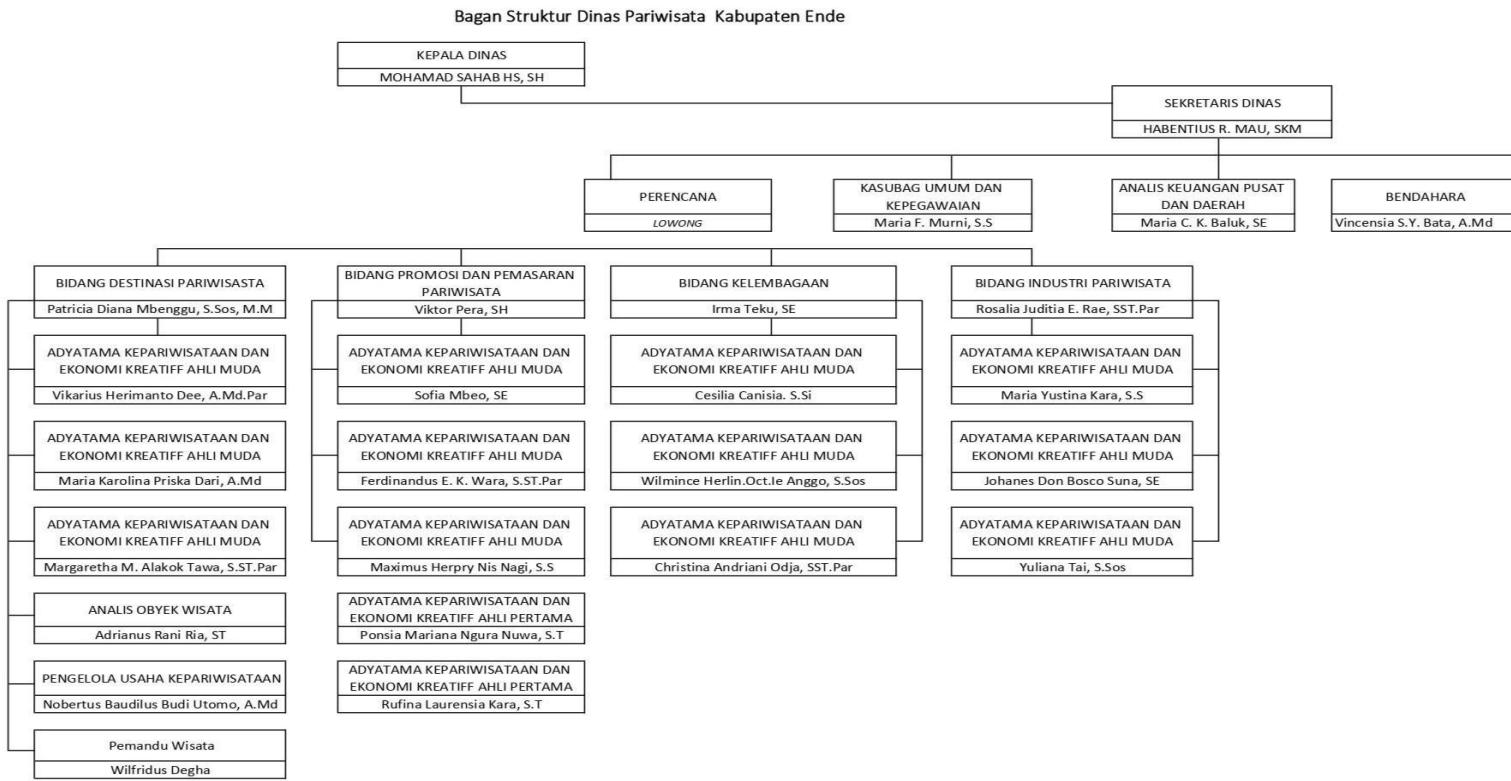
Selanjutnya Bupati Djafar Ahmad 2019-2024 pada masa kepemimpinan Bupati Djafar Ahmad 2019-2024, pengembangan pariwisata di Kabupaten Ende menjadi salah satu prioritas utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat identitas budaya daerah. Bupati Djafar fokus pada peningkatan fasilitas pendukung dan promosi destinasi wisata unggulan, seperti situs budaya, alam, dan adat istiadat yang kaya akan nilai sejarah. Selain itu, mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan komunitas lokal, untuk menciptakan pengalaman wisata yang menarik dan berkelanjutan. Upaya tersebut bertujuan untuk mampu menarik lebih banyak kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, serta

memperluas peluang ekonomi di sektor pariwisata yang ramah lingkungan dan berbudaya.

Melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, Bupati berkomitmen untuk mendukung pengembangan kepariwisataan sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah. Langkah tersebut dilakukan dengan melakukan berbagai program promosi dan pemasaran destinasi wisata unggulan di Kabupaten Ende, baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Selain itu, Dinas Pariwisata juga fokus pada peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendukung agar wisatawan merasa nyaman selama berkunjung. Pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja di sektor pariwisata menjadi prioritas untuk memastikan pelayanan yang berkualitas. Melalui sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, pengembangan pariwisata di Kabupaten Ende bertujuan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Bupati juga mendorong inovasi dan pelestarian budaya serta lingkungan sebagai bagian dari pengembangan kepariwisataan. Dinas Pariwisata berupaya mengangkat potensi budaya adat, situs bersejarah, dan keindahan alam yang khas di Kabupaten Ende sebagai daya tarik utama. Pengembangan wisata berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi fokus utama agar keberlanjutan destinasi di Kabupaten Ende terjaga.

Bagan 3.1

Struktur Dinas Pariwisata Kabupaten Ende



Tabel 3.2
Data Kepegawaian Dinas Pariwisata Kabupaten Ende
Tahun 2025

No	Nama ASN/NIP	Pangkat/Golongan	Pendidikan Terakhir	Unit Kerja	Jabatan
1	2	3	4	5	6
1	Drs. Martinus Satban,M.Si 19661231 198803 1 333	Pembina Utama Muda/IV c	Magister Sains	Sekretariat	Kepala Dinas
2	Sabina Donasia, S.Sos 19651212 198903 2 021	Pembina TK I/IV b	Sarjana Sosiatri	Sekretariat	Sekretaris
3	Rosalia Juditia E. Rae, SST.Par 19690515 199903 2 011	Pembina/IV a	Sarjana Pariwisata	Bidang Industri Pariwisata	Kepala Bidang Industri Pariwisata

4	Irma Teku, SE 19710503 200604 2 932	Pembina/IV a	Sarjana Ekonomi	Bidang Kelembagaan	Kepala Bidang Kelembagaan
5	Viktor Pera, SH 19711025 200701 1 013	Pembina/IV a	Sarjana Hukum	Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran
6	Maria Yustina Kara, S.S 19740917 200112 2 004	Penata TK I/III d	Sarjana Sastra	Bidang Industri Pariwisata	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
7	Cesilia Canisia. S.Si 19720425 200604 2 003	Penata TK I/III d	Sarjana Sains Geografi	Bidang Kelembagaan	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
8	Maria Caesilia Karista Baluk, SE 191750327 200604 2 006	Penata TK I/III d	Sarjana Ekonomi	Sekretariat	Analis Keuangan Pusat dan Daerah

9	Sofia Mbeo, SE 19750515 200701 2 031	Penata TK I/III d	Sarjana Ekonomi	Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
10	Maria Florentiana Murni,SS 19810620 201001 2 007	Penata TK I/III d	Sarjana Sastra	Sekretariat	Kasubag Umum dan Kepegawaian
11	Wilmince Herlin.Oct.Ie Anggo, S.Sos 19750307 200003 2 005	Penata TK I/III d	Sarjana Sosiatri	Bidang Kelembagaan	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
12	Johanes Don Bosco Suna, SE 19770627 200212 1 012	Penata TK I/III d	Sarjana Ekonomi	Bidang Industri Pariwisata	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda

13	Ferdinandus Edmundus S.ST.Par KA, 19751120 200112 1 007	Penata TK I/III d	Sarjana Pariwisata	Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
14	Maximus Herpry Nis Nagi, S.S 19800518 201001 1 011	Penata TK I/III d	Sarjana Sastra	Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
15	Yuliana Tai,S.Sos 19820723 200901 2 006	Penata TK I/III d	Sarjana Sosiatri	Bidang Industri Pariwisata	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
20	Christina Andriani Odja, SST.Par 19730420 200604 2 025	Penata/III d	Sarjana Pariwisata	Bidang Kelembagaan	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda

16	Vikarius Herimanto Dee, A.Md.Par 19750221 200312 1 004	Penata/III c	Diploma III Pariwisata	Bidang Destinasi	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
17	Maria Karolina Priska Dari, A.Md 19761224 200312 2 007	Penata/III c	Diploma III Pariwisata	Bidang Destinasi	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
18	Margaretha M. Alakok Tawa, S.ST.Par 19831010 201101 2 020	Penata/III d	Diploma IV Pariwisata	Bidang Destinasi	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
19	Nobertus Baudilus Budi Utomo, A.Md 19770520 200502 1 005	Penata/III c	Diploma III Pariwisata	Bidang Destinasi	Pengelola Usaha Kepariwisataan
	Adrianus Rani Ria, ST				

21	19770503 200801 1 018	Penata/III c	Sarjana Teknik	Bidang Destinasi	Analis Obyek Wisata pada Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata
23	Laurensius Moa 19660819 199403 1 004	Penata Muda TK I/III b	SMA	Sekretariat	Pengadministrasian Persuratan
24	Vincensia Selvie Yanti Y, Bata, A.Md 19750614 201407 2 002	Penata Muda/III a	Diploma III Pariwisata	Sekretariat	Bendahara Pada Sub Bagian Keuangan Sekretariat
25	Blasius Tau, A.Md 19730409 201409 1 002	Penata Muda/III a	Diploma III	Sekretariat	Pengeloa Pemanfaatan BMD Pada Sub Bagian UP Sekretariat
26	Wilfridus Degha 19791218 200701 1 012	Pengatur TK I/II d	SMA	Bidang Destinasi	Pemandu Wisata Pada Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata

27	Ponsia Mariana Ngura Nuwa, S.T 198108132023212015	IX	Sarjana Teknik Planalogi	Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Adyatama kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama
28	Rufina Laurensia Kara, S.T 199007102023212047	IX	Sarjana Teknik Arsitek	Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Adyatama kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama

Tabel 3.3
Komposisi ASN dan PPPK yang Melaksanakan Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan di Lingkup Dinas Pariwisata Kabupaten
Ende

No	Bidang	Tingkat Pendidikan						JML
		SMA	D3 Umum	D3 Par	S1 Umum	S1 Par	S2	
1	Sekretariat	-	-	1	4	-	-	5
2	Bidang Promosi Pemasaran	-	-	-	5	1	-	6
3	Bidang Kelembagaan	-	-	-	3	1	-	4
4	Bidang Industri	-	-	-	3	1	-	4
5	Bidang Destinasi	1	-	3	1	1	1	7
	JUMLAH	1	-	4	16	4	1	26

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Ende

Berdasarkan tabel 3.3 di atas menjelaskan bahwa komposisi ASN dan PPPK berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024, berpendidikan SMA berjumlah 1 orang pada Bidang Destinasi, D3 Pariwisata berjumlah 4 orang dengan pembagian sekretariat 1 orang, bidang destinasi 3 orang, selanjutnya S1 umum sekretariat 4 orang, bidang promosi pemasaran 5 orang, bidang kelembagaan 3 orang, bidang industri 3 orang dan bidang destinasi 1 orang dengan jumlah 16 orang. S1 pariwisata bidang promosi pemasaran 1 orang, bidang kelembagaan 1 orang, bidang industri 1 orang dan bidang destinasi 1. S2 berjumlah 1 orang pada bidang destinasi pariwisata.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan Daerah Kabupaten Ende dalam melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan sebagai bentuk pembangunan dengan tujuan yang berdampak signifikan terhadap masyarakat Kabupaten Ende secara keseluruhannya. Bentuk pelaksanaan rencana induk kepariwisataan di Kabupaten Ende meliputi beberapa aspek. Titik fokus peneliti dalam kajian kali ini adalah; pengembangan sumber daya manusia, pengembangan destinasi, pengembangan industri, pengembangan pemasaran, dan pengembangan kelembagaan.

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi penting dalam pengembangan kepariwisataan berkualitas secara berkelanjutan. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat bermanfaat bagi pengembangan kepariwisataan. Kemampuan dan kompeten yang dimiliki masyarakat sebagai pengelola dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dinas terkait menjadi titik utama keberlajutan pariwisata. Pengembangan kepariwisataan akan berdampak signifikan ketika sumber daya pengelola memenuhi standar pembangunan berkualitas.

Berdasarkan observasi penulis pada tanggal 27 Januari 2025, pelaksanaan rencana induk pembangunan kepariwisataan dalam aspek startegi pengembangan sumber daya pengelola, penulis menemukan bahwa adanya rencana dan strategi pengembangan sumber daya manusia pada pariwisata dengan aspek, kegiatan utama dan tujuannya. Strategi pengembangan sumber daya tersebut melibatkan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara. Untuk menjawab strategi tersebut

Pemerintah Kabupaten Ende melakukan kerja sama dengan Universitas Udayana Bali dan Universitas Gadjah Mada, dan pihak swasta. Penulis juga menemukan bahwa motivasi kerja yang baik dengan dibuktikan tingkat kedisiplinan tinggi dan strategi yang digunakan dalam pengembangan kepariwisataan. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu strategi utama pengembangan, masyarakat ditempatkan sebagai relasi dalam urusan kepariwisataan. Sejauh ini kerja sama yang dibangun mampu membuat beberapa kegiatan seperti pelatihan dan edukasi dengan melibatkan masyarakat dan pokdarwis di setiap objek wisata. Tentunya pelatihan dan edukasi sebagai bekal masyarakat dan pokdarwis untuk memahami konsep pariwisata jangka panjang. Melalui peraturan daerah yang ditetapkan, masyarakat menjadi aktor utama penggerak perekonomian lokal. Pemahaman masyarakat akan pentingnya pariwisata berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Dokumen pengembangan sumber daya manusia sangat penting karena berfungsi sebagai panduan strategis dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja karyawan, serta memastikan kesesuaian antara tujuan organisasi dan pengembangan individu (Holton 2001).

Tabel 4.1
Dokumen Perencanaan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

No	Aspek	Kegiatan Utama	Tujuan
1	Pendidikan Formal	Sekolah Pariwisata dengan jurusan pariwisata	Menyiapkan tenaga yang berkualitas
2	Pelatihan dan kursus	Pelatihan bahasa asing, manajemen	Meningkatkan SDM pada tenaga kerja
3	Sertifikasi	Uji kompetensi	Menjamin kualitas

			SDM
4	Pengembangan keterampilan	Seminar, magang	Meningkatkan keahlian
5	Penguatan jaringan	Kemitraan, kerja sama	Menciptakan kerja sama yang solid

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Ende

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia pada bidang kepariwisataan Kabupaten Ende telah tertuang dalam dokumen perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Perencanaan pengembangan dilakukan melalui aspek; Pendidikan Formal, Pelatihan dan Kursus, Sertifikasi, Pengembangan Keterampilan, Penguatan Jaringan dengan kegiatan utama yang dimiliki oleh masing-masing aspek, dalam perencanaan tersebut bertujuan untuk Menyiapkan tenaga yang berkualitas, Meningkatkan SDM pada tenaga kerja, Menjamin kualitas SDM, Meningkatkan keahlian, dan Menciptakan kerja sama.

Gambar 4.1

Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Ende dan UGM



Sumber: Dokumentasi kemitraan.ugm.ac.id

Berdasarkan gambar 4.1 di atas dikutip dari kemitraan.ugm.ac.id menjelaskan bahwa kerja sama yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Ende bersama Universitas Gadjah Mada menjadi salah satu langkah strategis pada pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan daerah. Langkah tersebut diambil sebagai benyuk kerja sama dalam pengembangan strategi kepariwisataan daerah, dan diakiri dengan penandatanganan nota kesepahaman mengenai pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk jangka waktu 5 Tahun. Pada pertemuan tersebut pejabat Bupati Ende bersama Ketua DPRD Kab. Ende diterima oleh pihak UGM seperti sekretaris Universitas bersama jajarannya. Penandatanganan diakhir pertemuan menunjukkan komitmen yang kuat antara UGM dan Kabupaten Ende dengan tujuan kemanfaatan jangkah panjang. Melalui strategi kerja sama yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ende menunjukkan pelaksanaan strategi yang direncanakan dalam buku induk pembangunan kepariwisataan daerah (RIPPARD).

Tabel 4.2
Data Sertifikasi Profesi SDM dan Pariwisata Ekonomi Kreatif
2014 s.d 2024

No	Jenis Kompetensi	Tahun Sertifikasi	Jumlah
1	Room Attendant	Thn. 2018,2019.2020	12
2	Front Office	Thn. 2018,2019.2020	15
3	Waiter	Thn. 2018,2019.2020	17
4	Accaounting	Thn.2019	1
5	Supervisor Resto	Thn.2019	1
6	Maintenance	Thn.2019	2

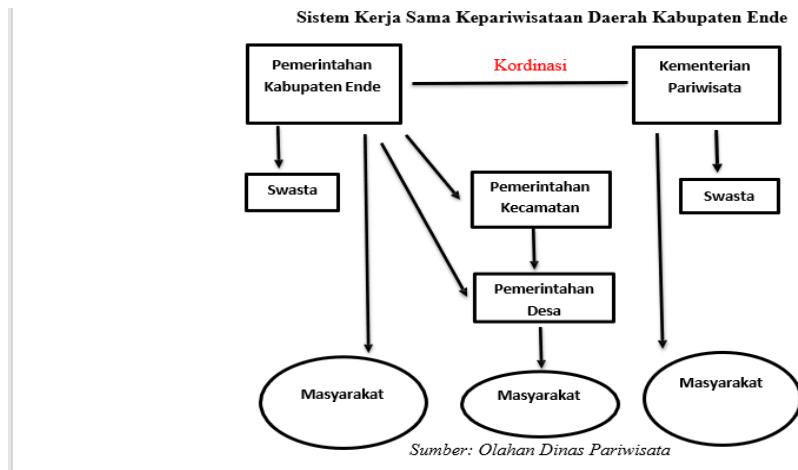
7	House Keeping	Thn. 2018,2019,2020	10
8	Gardener	Thn.2019	3
9	Security	Thn.2019	4
10	Driver	Thn.2019	1
11	Guide	Thn.2019	5
12	Penyanyi Solo	Thn.2019	17
13	Musisi	Thn.2019	27
	Jumlah		115

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Ende

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menjelaskan bahwa usaha pengembangan profesi sumber daya manusia untuk bidang pariwisata Kabupaten Ende terus dilakukan setiap Tahun bermula dari Tahun 2019 hingga 2024, dengan adanya kejelasan sumber daya manusia, mampu membuat pengembangan kepariwataan menuju era modern dan sesuai kebaruan kebutuhan wisatawan. Ketersediaan sertifikasi profesi SDM merupakan salah satu strategi pengembangan kepariwsataan jangka panjang.

Bagan 4.1

Sistem Kerja Sama Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ende



Sumber: Olahan Dinas Pariwisata

Berdasarkan bagan 4.1 di atas dijelaskan bahwa pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Ende melibatkan setiap sektor kepentingan. Kerja sama dan kordinasi dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Ende bersama Kementerian Pariwisata dalam sistem pengelolaan. Swasta menjadi relasi dalam bekerja sama peningkatan spot wisata. Kerja sama Bersama swasta seperti Pt. Kelimutu Citra Mandiri, Ronald Tour Trevel, Pt Merdeka Multi, Pt Angkasa Trevel, Ecolodge. Bintang, Palm, Century untuk mendukung pengembangan pariwisata. Bagan tersebut juga menjelaskan bahwa pengelolaan pariwisata menempatkan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, masyarakat dalam melakukan berkordinasi dan kerja sama. Masyarakat dianggap sebagai penggerak atau pelaku utama pengembangan pariwisata Kabupaten Ende.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Vinsensius Sanggu DPRD Kabupaten Ende periode 2024-2029 menjelaskan bahwa;

“sumber daya manusia menjadi penting dalam urusan wisata, sumber daya masyarakat sebagai

pengelolah bersumber dari dinas yang bersangkutan, dengan cara memberikan edukasi terkait urusan pariwisata ini, saya melihat organisasi perangkat daerah di Kabupaten Ende sangatlah lemah, aparatur sipil negara di Dinas parwisata tidak memiliki kemampuan yang kompeten dalam urusan wisata, dinas parwisata menjadi ladang ASN dalam kenaikan pangkat, kebanyakan pejabat yang mendapatkan posisi strategis tidak memiliki latar belakang pengetahuan yang cukup memadai” (wawancara 01/02/2025)

Selanjutnya berdasarkan wawancara bersama Ibu Rosalia Juditia Embu Rae selaku kepala bidang industri pariwisata menjelaskan bahwa;

“dalam mendukung pengembangan kepariwisataan daerah Kabupaten Ende kami telah merumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya pengelolah menjadi penting dalam urusan pariwisata, strategi lainnya kami melakukan kerja sama bersama UGM sebagai langkah dalam mengembangkan kepariwisata. Strategi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan formal, pelatihan dan kursus, sertifikasi, pengembangan keterampilan, penguatan jaringan dengan kegiatan utama yang dimiliki oleh masing-masing aspek, dalam perencanaan tersebut bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas, meningkatkan SDM pada tenaga kerja seperti keahlian dan menciptakan kerja sama yang solid” (wawancara tanggal 03/02/2025).

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Viktor Pera kepala bidang prmasaran dan promosi menjelaskan bahwa;

“pengembangan kepariwisataan daerah Kabupaten Ende telah dirumuskan dalam dokumen strategi pengembangan SDM, pengembangan tersebut menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan kemampuan pengelolah akan konsep pengembangan

pariwisata jangkah panjang. Strategi lainnya dalam pengembangan seperti melakukan kerja sama bersama pihak Uniiversitas sebagai pendukung dalam komitmen kerja sama untuk mencapai visi misi kepariwisataan daerah. Perencanaan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan pegawai dan masyarakat sebagai pengelolah” (wawancara tanggal 07/02/2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa; Aspek sumber daya manusia menjadi penting dalam pengembangan kepariwisataan daerah Kabupaten Ende. Pengembangan kepariwisataan daerah telah tertuang dalam dokumen perencanaan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan pegawai dan masyarakat sebagai pengelolah dengan metode Pendidikan Formal, Pelatihan dan Kursus, Sertifikasi, Pengembangan Keterampilan, Penguatan Jaringan dengan kegiatan utama yang dimiliki oleh masing-masing aspek, dalam perencanaan tersebut bertujuan untuk Menyiapkan tenaga yang berkualitas, Meningkatkan SDM pada tenaga kerja, Menjamin kualitas SDM, Meningkatkan keahlian, Menciptakan kerja sama yang solid. Kersa sama lainya yang dibangun Dinas Pariwisata kabupaten Ende seperti melakukan kerja sama dengan pihak akademisi melalui UGM.

Ketergantungan sumber ekonomi dari aspek pariwista dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat sebagai pengelola, masyarakat harus mempunyai pekerjaan lainya sehingga ketika terjadi penurunan jumlah kunjungan atau kerusakan pada objek pariwisata, masyarakat mampu bertahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan wawancara bersama Bapak Viktor Pera kepala bidang pemasaran dan promosi menjelaskan bahwa;

“pekerjaan masyarakat disektor pariwisata tidak menjamin kesejahteraan secara maksimal, pemahaman terkait usaha lain terhadap pariwisata sangatlah minim, masyarakat pada objek wisata Danau Kelimutu mengandalkan usaha wisata dan tidak memiliki usaha lainnya, hal ini berdampak buruk pada kejadian Covid 19 kemarin, kami melakukan edukasi terkait pengelolaan pariwisata, edukasi terhadap pencegahan permasalahan seperti Covid 19 tidak disampaikan oleh kami kepada masyarakat” (wawancara tanggal 07/02/2025).

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Rosalia Juditia Embu Rae selaku kepala bidang industri pariwisata menjelaskan bahwa;

“kami memberikan edukasi terkait sumber penghasilan yang belum sepenuhnya merata dan menciptakan kesejahteraan secara maksimal terhadap masyarakat untuk tidak menggantungkan sumber pendapatan dari aspek parwisata, harus ada usaha ataupun pekerjaan lainnya yang dapat menjadi lapisan ekonomi ketika pariwisata mengalami pengurangan jumlah penduduk, kita lihat saja contoh pada masyarakat disekitaran danau kelimutu, memang kelimutu menjadi destinasi unggulan yang dimiliki Kabupaten Ende, tetapi ketergantungan terhadap pariwisata tidak baik, ketika terjadi covid 19 kemarin, banyak masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan” (wawancara tanggal 03/02/2025).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara bersama salah satu pedagang di sekitaran objek wisata Danau Kelimutu, Ibu Kristina Mbue Rara menjelaskan bahwa;

“pada saat terjadi Covid 19 kami mengalami penurunan pendapatan dikarenakan tutupnya aktivitas kepariwisataan di Danau Kelimutu, permasalahan tersebut menimbulkan penurunan ekonomi yang mengakibatkan berdampak langsung pada kehidupan kami. Kami tidak memiliki sumber pendapatan lain, selain bergantung pada pariwisata. Kami tidak mendapatkan edukasi atau sosialisasi terkait pencegahan terhadap permasalahan tersebut” (wawancara tanggal 10/02/2025).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa; pemahaman masyarakat dalam ketergantungan sumber perekonomian dalam sektor pariwisata membawa dampak negatif. Pada kasus pandemi COVID-19, Meskipun Danau Kelimutu merupakan destinasi unggulan Kabupaten Ende, kurangnya pemahaman tentang pentingnya diversifikasi usaha dan penghasilan menjadi masalah utama. Masyarakat setempat mengandalkan pariwisata dan tidak memiliki usaha peningkatan perekonomian lain. Edukasi atau sosialisasi terhadap antisipasi permasalahan tersebut tidak disampaikan kepada masyarakat sebagai pengelolah.

Gambar 4.2
Pengembangan Sumber Daya Pengelola



Sumber; Dinas Pariwisata Kab. Ende

Gambar 4.2 di atas menjelaskan bahwa strategi pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh Dinas Pariwisata dengan model kegiatan pengembangan ekonomi kreatif sub sektor musik, kuliner, sosialisasi ekonomi kreatif, seni pertunjukan, pelatihan souvenir anyaman. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan strategi pengembangan sumber daya manusia di sektor pariwisata. Kegiatan melibatkan pelaku pariwisata, pelajar, kelompok sanggar tari, dan kelompok sadar wisata dari desa-desa wisata dan kelurahan di Ende. Pelaksanaan di Hotel Makanul Amni dan Hotel Flores Mandiri.

Berdasarkan standar pengembangan sumber daya manusia, strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ende adalah memiliki dokumen perencanaan pengembangan dengan sistem berkelanjutan dan jangka panjang. Strategi tersebut telah dicantumkan berdasarkan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada lingkup Dinas Pariwisata dan masyarakat sebagai pengelolah utama. Dalam melakukan edukasi atau pemahaman terhadap masyarakat dilaksanakan tidak secara signifikan, dibuktikan dengan edukasi yang tidak dilakukan pada masyarakat kelimutu untuk tidak mengandalkan pariwisata sebagai satu-satunya sumber ekonomi tidak berhasil, dan kehilangan sumber pendapatan pada saat terjadi Covid-19. Pelaksanaan rencana induk pembangunan kepariwisataan pada aspek sumber daya manusia sebagai pengelolah, berdasarkan temuan penulis menemukan bahwa strategi yang dicantumkan dalam RIPPARDA Kabupaten Ende terlaksana secara signifikan. Melalui kegiatan yang berjalan seperti; pelatihan Pelatihan Koreografi, Pendampingan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Seni Pertunjukan, Fashion dan Fotografi, Game, Film, Video, Animasi, dan Pembuatan Souvenir Anyaman.

B. Pengembangan Bidang Industri

Perkembangan industri pariwisata di Kabupaten Ende, berjalan seiring perkembangan kepariwisataan di Nusa Tenggara Timur. Secara umum perkembangan terjadi secara reaktif terhadap pemenuhan kebutuhan wisatawan. Pengembangan industri kepariwisataan Kabupaten Ende, untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan budaya lokal. Berdasarkan observasi penulis pada tanggal 30 Januari 2025 menemukan bahwa bidang industri pada Dinas Pariwisata Kabupaten Ende memiliki wewenang dalam menentukan akomoditas sebagai

tempat persinggahan berdasarkan standar dan kelayakan bagi wisatawan yang berkunjung. 10 Tahun berjalan bidang industri pariwisata selalu menentukan tempat industri di Kabupaten Ende. Pengembangan industri dengan status memperbarui, memberikan nilai tambah, dan mengadakan. membawa dampak bagi masyarakat dalam pendapatan ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Pengembangan industri meliputi hotel dan penginapan, makanan khas, trevel agen, dan toilet pada objek wisata. Pengadaan tempat industri sebagai tempat penginapan bagi wisatawan menggunakan sistem kerja sama bersama masyarakat dan swasta untuk menerapkan sistem keberlanjutan atau jangkah panjang. Pelaksanaan tersebut tetap memperhatikan aspek budaya dan lingkungan sehingga tetap dilestarikan.

Tabel 4.3

**Data Pengembangan Hotel dan Penginapan di Kabupaten
Ende Tahun 2014-2024**

No	Nama Akomodasi	Alamat	Klasifikasi	Status
1	Pondok Indah Olangari	Jalan Melati	Akomodasi Jangka Pendek	Diadakan Tahun 2020
2	Grand Wisata Hotel	Jl kelimutu No.32	Hotel Melati	Memperbarui
3	Hotel Ikhlas	Jl Yani No.69	Akomodasi jangka Pndek	Diadakan Tahun 2019
4	Florentina Homestay	Jl TNK Km 3	Pondok Wisata	Diadakan Tahun 2018
5	Anjas Homestay	Jl TNK Km 3	Pondok Wisata	Diadakan Tahun 2018

6	Safir Homestay	Jl TNK Km 3	Pondok Wisata	Diadakan Tahun 2018
7	Telli Homestay	Jl TNK Km 3	Pondok Wisata	Diadakan Tahun 2018
8	Estevania Lodge	Jl Trans Nd-Mof	Hotel Melati	Memperbaharui
9	Palm Bungalow	Woloara	Hotel Melati	Memperbaharui
10	Simplisius Homestay	Pemo	Pondok Wisata	Diadakan Tahun 2020
11	Gaspar Homestay	Pemo	Pondok Wisata	Diadakan Tahun 2020
12	Rosa Homestay	Pemo	Pondok Wisata	Diadakan Tahun 2020
13	Paulus Homestay	Pemo	Pondok Wisata	Diadakan Tahun 2020
14	Ranggadua Homestay	Pemo	Pondok Wisata	Diadakan Tahun 2020
15	Maksi Homestay	Pemo	Pondok Wisata	Diadakan Tahun 2020
16	Pius Homestay	Pemo	Pondok Wisata	Diadakan Tahun 2020
17	Sitty Homestay	Pemo	Pondok Wisata	Diadakan Tahun 2017
18	Melkilaus Homestay	Pemo	Pondok Wisata	Diadakan Tahun 2017
19	Arnoldus Homestay	Pemo	Pondok Wisata	Diadakan Tahun 2017
20	Antonius Homestay	Pemo	Pondok Wisata	Diadakan Tahun 2017
21	Very Homestay	Pemo	Pondok Wisata	Diadakan Tahun 2017
22	LCR Hotel	Jl Melati	Akomodasi Jangka Pendek	Diadakan Tahun 2016
23	Alhidaya Hotel	Jl Yos Sudarso	Pondok Wisata	Diadakan Tahun 2021
24	Hotel Flores Mandiri	Jl Eltari No.1	Hotel Melati	Memberi nilai tambah
25	Hotel Flores	Jl Sudirman	Hotel Melati	Memperbaharui

		No.28		
26	Losmen H Mansyur	Jl Aembonga 3	Hotel Melati	Memperbarui
27	King Hotel	Jln Kemakmurran	Hotel Melati	Memperbarui
28	Hotel Rahmat	Jl Aembonga I	Hotel Melati	Memperbarui
29	Bawelo Homestay	Pemo	Akomodasi jangka Pendek	Diadakan Tahun 2021
30	Jaya Hill Garden	Jl trans Nd-Mof	Akomodasi jangka Pendek	Diadakan Tahun 2021
31	Fanny Hotel	Jl kelimutu No.61	Akomodasi jangka Pendek	Diadakan Tahun 2021
32	Farila Logde	Jln Trans Nd-Mof	Akomodasi jangka Pendek	Diadakan Tahun 2021
33	Mahoni Guest House	Jln Trans Nd-Mof	Akomodasi jangka Pendek	Diadakan Tahun 2021
34	Family Guest House	Jln Trans Nd-Mof	Akomodasi jangka Pendek	Diadakan Tahun 2021
35	Legend Guest House	Jln Trans Nd-Mof	Akomodasi jangka Pendek	Diadakan Tahun 2021
36	Flores House	Jl Woloare B	Pondok Wisata	Diadakan Tahun 2020
37	Hotel Iklas	Jl Ahmad Yani No 69	Akomodasi jangka endek	Diadakan Tahun 2020
38	Harrison Hotel	Jl Kelimutu No.11	Akomodasi jangka Pendek	Diadakan Tahun 2021

39	Berlian Hotel	Jl. Ahmad Yani 20	Akomodasi jangka Pendek	Diadakan Tahun 2020
40	Nurjaya Hotel	Jl TNK Km 3	Akomodasi jangka Pendek	Diadakan Tahun 2019
41	Century Homestay	Jl TNK Km 3	Akomodasi jangka Pendek	Diadakan Tahun 2019
42	Igen Homestay	Jl TNK Km 3	Akomodasi jangka Pendek	Diadakan Tahun 2019
43	Bella Homestay	Jl TNK Km 3	Akomodasi jangka Pendek	Diadakan Tahun 2019
44	Sius Homestay	Jl TNK Km 3	Akomodasi jangka Pendek	Diadakan Tahun 2019
45	Stanis Homestay	Moni Kelimutu	Pondok Wisata	Memperbaui
46	J-Hotel	Jl Gatot Subroto	Hotel Melati	Memberi nilai tambah
47	Syifa Hotel	Jl gatot Subroto	Hotel Melati	Memberi nilai tambah
48	J-Hotel 2	Jl Durian No.9	Hotel Melati	Memberi nilai tambah
49	Hotel Makanul Amni	Jl Mahoni No. 33	Hotel Melati	Memberi nilai tambah
50	Hotel Sinar Harapan	Jl Eltrai	Hotel Melati	Memberi nilai tambah
51	Satarmese Hotel	Jl Durian Atas	Pondok Wisata	Memperbarui
52	Dasi Guest House	Jl Ahmad Yani	Hotel Melati	Memberi nilai tambah
53	Merpati Hotel	Jl Ahmad Yani	Hotel Melati	Memberi nilai tambah

54	Rinjani Hotel	Jln Trans Nd-Mof	Hotel Melati	Memberi nilai tambah
55	Filo Lodge	Jln Trans Nd-Mof	Pondok Wisata	Memperbaharui
56	Bintang Bungalow	Jln Trans Nd-Mof	Pondok Wisata	Memperbaharui
57	Centy Lodge	Jln Trans Nd-Mof	Pondok Wisata	Memperbaharui
58	Watugana Bungalow	Jln Trans Nd-Mof	Pondok Wisata	Memperbaharui
59	Silvester Homestay	Jln Trans Nd-Mof	Pondok Wisata	Memperbaharui
60	Rice Field	Jln Trans Nd-Mof	Pondok Wisata	Memperbaharui
61	Pondok Hidayat	Jln Trans Nd-Mof	Akomodasi Jangka	Diadakan Tahun 2019
62	Arwanti Bungalow	Jl Trans Nd-Mof	Pondok Wisata	Memperbaharui
63	Sao Ria Wisata	Jl Flores Mandiri	Pondok Wisata	Memperbaharui
64	Hotel Dwi Putra	Jl Yos Sudarso	Pondok Wisata	Memperbaharui
65	Mentari Hotel	Jl Pahlawan	Hotel Melati	Memberi nilai tambah
66	Daniel Lodge	Jln Trans ND-MOF	Pondok Wisata	Memperbaharui
67	Antoneri Logde	Jln Trans ND-MOF	Pondok Wisata	Memperbaharui
68	Maria Inn	Jln Trans ND-MOF	Pondok Wisata	Memperbaharui
69	Kelimutu Logde	Jl Ahmad Yani	Pondok Wisata	Memperbaharui
70	Intan Homestay	Jl TNK Km 3	Hotel Melati	Memberi nilai tambah
71	Amalo Homestay	Jl TNK Km 3	Pondok Wisata	Memperbaharui
72	Alloy Homestay	Jl TNK Km 3	Pondok Wisata	Memperbaharui

73	Andys Homestay	Jl Trans ND-MOF	Pondok Wisata	Memperbarui
74	Hotel Anggrek	Jl Gatot Subroto	Pondok Wisata	Memperbarui
75	Fanny Hotel	Jl Kelimutu	Hotel Melati	Memberi nilai tambah

Sumber: *Dinas Pariwisata Kabupaten Ende*

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dijelaskan bahwa pengembangan industri pariwisata Kabupaten Ende memiliki 75 tempat penginapan layak huni yang dibagikan dalam klasifikasi pondok wisata berjumlah 36 buah, akomodasi jangka pendek berjumlah 20 buah, dan hotel melati berjumlah 19 buah, yang tersebar dengan alamat yang berbeda-beda. Pengembangan tersebut dengan status memperbaiki sebanyak 26 penginapan yang dilakukan dengan cara memperbaiki fasilitas dan kelengkapan penginapan berdasarkan standar kelayakan seperti peningkatan jumlah kamar, area parkir. Pengembangan dengan status pengadaan sebanyak 37 penginapan, pengadaan dimaksud untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam memerlukan penginapan, dan membuka usaha bagi masyarakat dan swasta dalam pendapatan ekonomi. Pengembangan dengan status memberi nilai tambah terdapat 12 penginapan, dengan menghadirkan setiap penginapan cafe dan kolam sebagai daya tarik bagi wisatawan.

Tabel 4.4

**Data Pengembangan Jumlah Restoran Rumah Makan Menurut
Kecamatan Tahun 2014-2024**

No	Kecamatan	Ketersediaan			Status	Deskripsi
		Restoran	Rumah Makan	Cafe		
1	Nangapanda	-	1	-	Memperbaharui	-
2	Pulau Ende	-	-	-	-	-
3	Maukaro	-	-	-	-	-
4	Ende	-	-	1	Diadakan Tahun 2020	-
5	Ende Selatan	-	11	1	Diadakan dan memperbaharui	Diadakan 5 Rumah Makan Tahun 2018,2019
6	Ende Utara	1	13	13	Diadakan dan memperbaharui	Diadakan 3 Rumah Makan, 5 Café Thn 2019
7	Ende Tengah	2	25	4	Diadakan dan memperbaharui	Diadakan 5 Rumah Makan, 1 Café Thn 2020
8	Ende Timur	-	25	2	Diadakan	Diadakan 7 Rumah Makan Tahun 2019,2020
9	Ndona	1	-	1	Memperbaharui	-
10	Ndona Timur	-	-	-	-	-
11	Wolowaru	-	10	1	Diadakan dan memperbaharui	Diadakan 3 Rumah Makan Tahun 2019,2020
12	Wolojita	-	-	-	-	-
13	Ndori	-	-	-	-	-

14	Lio Timur	-	-	-	-	-
15	Kelimutu	2	16	9	Diadakan dan memperbaharui	Diadakan 7 Rumah Makan, 5 café Tahun 2018, 2019, 2020
16	Kelisoke	-	-	-	-	-
17	Detusoko	-	2	2	memperbaharui	-
18	Maurole	-	-	-	-	-
19	Wewaria	-	-	-	-	-
20	Detukeli	-	-	-	-	-
21	Kotabaru	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Ende

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dijelaskan bahwa ketersediaan restoran, rumah makan, dan cafe sebagai tempat akomoditas atau persinggahan bagi wisatawan dibagi dalam 21 Kecamatan dengan jumlah restoran 6 buah, rumah makan 103 buah dan cafe 34 buah. Berdasarkan jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa ketersediaan akomoditas seperti rumah makan dan restoran tidak dibagi secara merata disetiap Kecamatan di Kabupaten Ende. Pengembangan yang dilakukan dengan mengadakan 5 rumah makan di Kecamatan Ende Selatan, 3 rumah makan dan 5 cafe di Kecamatan Ende Utara, 5 rumah makan dan 1 cafe di Kecamatan Ende Tengah, 7 rumah makan di Kecamatan Ende Timur, 3 rumah makan di Kecamatan Wolowaru, 7 rumah makan dan 5 cafe di Kecamatan Kelimutu. Pengadaan dilakukan berdasarkan kerja sama pemerintah dan masyarakat setempat dengan tujuan memenuhi kebutuhan wisatawan. Pengadaan dilakukan dengan status memperbaharui dilakukan di Kecamatan Detusoko, Ndona dan Nangapenda. Pembaharuan dengan tujuan melengkapi fasilitas yang menjadi kekurangan

di tempat makan, dengan cara menghadirkan toilet, tempat parkir dan ketersediaan kipas angin.

Tabel 4.5
Data Pengembangan Biro Agen Perjalanan Wisata Tahun 2014-2024

No	Nama Usaha	Jenis Usaha APW/BPW	Alamat	Nomor TDUP	Status
1	Pt. Kelimutu Citra mandiri	APW	Jl. Gatot Subroto	-	Diadakan Tahun 2017
2	Ronald Tour and Trevel	APW	Jl. Ahmad Yani	KPPTSP.503/PK/03/XII/2011	Pembaharuan
3	Pt.merdeka multi	APW	Jl. Kelimutu	DPMPTSP.570/TDUP/04/V/2023	Diadakan Tahun 2023
4	Pt.angkasa Trevel	APW	Jl. Kelimutu	-	Diadakan Tahun 2017

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Ende

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dijelaskan bahwa jumlah usaha terdapat 4 perusahaan dan 2 memiliki nomor Tanda Daftar Usaha Wisata (TDUP) dan 2 perusahaan lainnya belum memiliki. Permasalahan tersebut menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Ende agar perlu adanya kerja sama bersama pihak swasta dalam mendukung peningkatan agen perjalanan wisata di Kabupaten Ende. Pengembangan yang dilakukan dengan mengadakan 3 biro agen perjalanan wisata dan melakukan pembaharuan

dengan memberikan nilai tambah pelayanan secara online sehingga mempermudah wisatawan dalam berkordinasi terkait biro agen.

Tabel 4.6
Data Pengembangan Angkutan Wisata Tahun 2014-2024

No	Angkutan Wisata	Alamat	Status
1	Ecolodge Trevel	Desa Koanara, Kec. Kelimutu	Memperbaharui
2	Bintang Trevel	Desa Koanara, Kec. Kelimutu	Memparbaharui
3	Palm Trevel	Desa Koanara, Kec. Kelimutu	Memparbaharui
4	Kelimutu Tevel	Desa Woloara Barat, Kec. Kelimutu	Memparbaharui
5	Century Trevel	Desa Waturaka, Kec. Kelimutu	Memparbaharui

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Ende

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dijelaskan bahwa terdapat 4 angkutan wisata dengan alamat 3 angkutan di Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu 1 angkutan wisata di Desa Woloara Barat, Kecamatan Kelimutu, dan 1 angkutan lainnya di Desa Waturaka, Kecamatan Kelimutu. Ketersediaan angkutan wisata masih sangat minim di Kabupaten Ende. Pelayanan urusan kepariwisataan harus memenuhi standar pelayanan yang berkualitas, Dinas Pariwisata dalam urusan pariwisata harus memperhatikan kebutuhan disetiap objek wisata. Pengembangan dilakukan dengan cara memperbanyak unit yang sebelumnya terdapat 1 unit angkutan disetiap Desa, mengalami peningkatan Tahun 2020 menjadi 2 unit disetiap Kecamatan tersebut.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Ibu Rosalia Juditia Embu Rae selaku kepala bidang industri pariwisata menjelaskan bahwa;

“Kami di bagian industri pariwisata, memiliki peran utama dalam mengembangkan industri pariwisata di Kabupaten Ende seperti; mengembangkan strategi, mengelolah program, mengordinasi kegiatan, dan mengawasi, dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas hidup, dan mengembangkan destinasi wisata, pengembangan dilakukan dengan cara memberi nilai tambah atau spot daya tarik pada tempat persinggahan, memperbarui dengan meningkatkan kualitas, melakukan pengadaan sesuai kebutuhan wisatawan dan membuka usaha bagi masyarakat dan swasta, pengadaan industri melibatkan masyarakat dan swasta dengan sistem keberlanjutan jangkah panjang, keterlibatan masyarakat berdampak pada pelestarian budaya dan lingkungan setempat” (wawancara tanggal 03/02/2025).

Selain jumlah penginapan, adapun tempat pembangunan lainnya seperti jumlah toilet, makanan dan minuman, jasa wisata juga merupakan bagian dari akomoditas kepariwisataan, berdasarkan wawancara penulis bersama Ibu Rosalia Juditia Embu menyampaikan bahwa;

“akomoditas sebagai faktor pendukung bagi aktivitas kepariwisataan, Kabupaten Ende dalam setiap tempat pariwisata memiliki keunikan dan akomodasi sebagai spot utama kegiatan berwisata. Ketersediaan Jasa transportasi wisata, trevel agent, dan begitu banyak makanan khas yang dimiliki setiap tempat wisata seperti; Uwi Ai Ndota (ubi cincang, Ngeta (rumput rampe), kue rambut, jagung cetamak, jagung bose, jagung titi, kue alu ndene” (wawancara tanggal 03/02/2025).

Selanjutnya Ibu Rosalia Juditia Embu Rae menjelaskan kendala dibidang industri kepariwisataan Kabupaten Ende sebagai berikut;

“Kami mengalami kendala yang dibagi dalam beberapa aspek seperti kendala infrastruktur pariwisata (jalan,jembatan, dan fasilitas umum). Kendala sumber

daya manusia seperti kurangnya keterampilan masyarakat di bidang pariwisata, kendala lingkungan seperti sering terjadi erupsi disepanjang jalan, kendala ekonomi seperti keterbatasan investasi, dan kendala teknologi dalam mengelolah kepariwisataan” (wawancara tanggal 03/02/2025).

Berdasarkan wawancara Ibu Rosalia Juditia Embu menyampaikan bahwa ada beberapa strategi yang belum dilaksanakan dalam meningkatkan industry pariwisata di Kabupaten Ende;

“Faktor penghambat yang tidak terlihat secara langsung namun berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas kerajinan tenun ikat meliputi kurangnya akses terhadap teknologi modern dan pelatihan yang memadai, sehingga para pengrajin sulit untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mutu hasil karya mereka. Selain itu, minimnya promosi dan pemasaran yang efektif menyebabkan kerajinan ini kurang dikenal luas di pasar domestik maupun internasional, sehingga potensi penjualan dan pengembangan usaha terbatas. Faktor lain yang sering menjadi penghambat adalah kurangnya dukungan dari pemerintah maupun lembaga terkait dalam hal pembinaan dan pengembangan industri kerajinan tradisional ini, sehingga inovasi dan inovasi berkelanjutan sulit untuk diimplementasikan. Semua faktor ini secara tidak langsung menghambat proses peningkatan kualitas dan kuantitas kerajinan tenun ikat secara konsisten dan berkelanjutan” (wawancara tanggal 03/02/2025).

Berdasarkan temuan penulis diatas terkait pembangunan kepariwisataan Kabupaten Ende bidang industri, pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kelayakan dalam kebutuhan wisatawan saat berkunjung. Industri merupakan salah satu aspek penting dalam urusan kepariwisataan, kenyamanan harus diciptakan kepada wisatawan saat melakukan kunjungan.

Pengembangan dilakukan dengan cara memberi nilai tambah atau spot daya tarik pada tempat persinggahan, memperbaharui dengan meningkatkan kualitas dan melakukan pengadaan sesuai kebutuhan wisatawan dan membuka usaha bagi masyarakat dan swasta. Pengembangan hotel, penginapan, biro agen, restoran, tempat makan, dan makanan khas daerah menjadi salah satu strategi penting dalam menarik banyak wisatawan untuk berkunjung. Pelaksanaan rencana induk pembangunan kepariwisataan bidang industri belum sepenuhnya dilaksanakan seperti; peningkatan kuantitas dan kualitas tenun ikat anyaman, sebagai cendramata bagi wisatawan disaat berkunjung.

C. Pengembangan Bidang Destinasi

Destinasi menjadi salah satu aspek pelaksanaan rencana induk melalui pengembangan kepariwisataan daerah, keindahan suatu destinasi berpengaruh terhadap jumlah pengunjung. Pengembangan destinasi di Kabupaten Ende, berdasarkan observasi penulis pada tanggal 02/02/2025 menemukan bahwa pengembangan destinasi dibagi dalam 3 aspek utama seperti wisata sejarah, wisata alam, dan wisata minat khusus. Keunggulan destinasi di Kabupaten Ende menjadikan berbagai bentuk spot wisata atau daya tarik utama. Kabupaten Ende yang dikenal dengan keunikan mampu menciptakan ke-3 aspek pariwisata tersebut. Keunggulan tersebut berdasarkan kemampuan pengelolaan awal dari masyarakat setempat yang menunjukkan adanya spot wisata yang dapat digunakan sebagai kegiatan berwisata. Pengembangan dilakukan dengan metode menghadirkan tempat wisata baru, memperbaharui tempat wisata, dan memberi nilai tambah pada spot wisata yang ada. Pengembangan terus

dilaksanakan dengan menggunakan metode kerja sama bersama masyarakat setempat, kehadiran masyarakat setempat dalam keterlibatan langsung dapat memahami konsep pengembangan kepariwisataan jangkah panjang dan berkelanjutan. Pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Ende berdasarkan panduan strategi perencanaan dalam buku induk pembangunan kepariwsataan daerah (RIPPARDA). Pengembangan dengan metode yang terencana secara sistematis menunjukkan bidang destinasi pariwisata Kabupaten Ende mampu menyediakan destinasi unggulan yang banyak menarik wisatawan untuk berkunjung, hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan jumlah pengunjung pada Tahun 2024.

Tabel 4.7
Data Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Ende
Tahun 2014-2024

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Objek dan Daya Tarik Wisata	Toilet	Status
1.	Ende Utara	Kota Raja	Wisata Sejarah <ul style="list-style-type: none"> 1. Situs Rumah Pengasingan Bung Karno 2. Taman Renungan Bung Karno 3. Mesjid Arrabitha 4. Pelabuhan Laut Soekarno 5. Rumah Bangunan Tua Kodim 6. Rumah Bangunan Tua Dinas Pariwisata. Wisata Alam Kawasan Bahari Pantai Kota Raja	2	Memberi nilai tambah
		Roworena	Wisata Minat Khusus dan Budaya Kerajinan Anyaman Bambu, Gedeg, Pandai Besi Tenun Ikat	2	Memperbarui

2.	Ende Timur	Desa Kedubodu Rewarangga	Wisata Alam Geopark Air Terjun Aeporo	2	Diadakan Tahun 2019
			Wisata Agro Agro Wisata Rewarangga	1	Diadakan Tahun 2019
			Wisata Budaya Kerajinan Tenun Ikat	1	Memperbarui
3.	Ende Tengah	Potulando	Wisata Sejarah 1.Serambi Soekarno	1	Memperbarui
			2. Gedung Imakulata	1	Memperbarui
			3. percetakan Pt. Ani	1	Diadakan tahun 2018
			4.Gereja Krostoreghi Katedral Ende	1	Memperbarui
			Wisata Alam Pantai Bita Bic	1	Memperbarui
4.	Ndona	Onelako	Wisata Budaya 1.Kampung Adat Radaara	1	Memperbarui
			2. Kerajinan Tenun Ikat	1	Diadakan Tahun 2018
		Manulondo	Wisata Budaya Kerajinan Tenun Ikat	1	Diadakan Tahun 2018
		Wolotopo	Wisata Alam 1.Pantai Tangga alam	1	Memperbarui
			2. Pantai Mbu,u	1	Diadakan Tahun 2018
			Wisata Budaya Kerajinan Tenun Ikat		Diadakan Tahun 2018

			Wisata Agro Agro Wisata Detusoko Barat	1	Diadakan Tahun 2021
	Saga		Wisata Budaya Kampung Adat Saga		Memberi nilai tambah
			Wisata Alam Air Terjun Munumera	1	Diadakan Tahun 2019
		Wologai Tengah	Wisata Budaya Kampung Adat Wologai	1	Memperbarui
			Wisata Alam Panorama Sawah Bertingkat	1	Diadakan Tahun 2020
			Wisata Minat Khusus <i>Bealandong Eco Camp/ Camping Ground</i>	1	Diadakan Tahun 2020
		Sipijena	Wisata Budaya Kampung Adat Sipijena dan Upacara Adat	1	Memberi nilai tambah
			Wisata Alam 1.Panorama Sawah Bertingkat	1	Diadakan Tahun 2018

			2. Kampung Adat Wolotolo	1	Memperbaharui
			G. Belut Keramat	1	Diadakan Tahun 2019
9.	Kelimutu	Koanara	Wisata Alam Air Terjun Murundao	1	Diadakan Tahun 2019
			Wisata Budaya 1. Adat Koanara	1	Memperbaharui
			2. Kampung Adat Watugana	1	Memperbaharui
		Waturaka	Wisata Alam 1. Air Terjun Murukeba		Diadakan Tahun 2019
			2. Permandian Air Panas Liasambe	1	Diadakan Tahun 2021
		Pemo	Wisata Alama Geopark Danau Kelimutu	1	Memberi nilai tambah

			Wisata Agro Agro Wisata Pemo	1	Memperbarui
			Wisata Budaya 1.Kampung Adat Pemo dan Upacara Adat	1	Memperbarui
			2.Ritua Pati Ka Dua Bapu Ata Mata	1	Memperbarui
		Woloara	Wisata Budaya 1.Kampung Adat Woloara	1	Memperbarui
			2.Kerajinan Tenun Ikat	1	Memperbarui
			Wisata Agro Agro Wisata Woloara	1	Memperbarui
		Woloara Barat	Wisata agro Agro Wisata Woloara Barat	1	Memperbarui
10.	Wolowaru	Lisedetu	Wisata Budaya Kampung Adat Lisedetu	1	Memperbarui

	Nualise	Wisata Budaya Kampung Adat Wolofeo	1	Memperbarui
	Mbuliwaralau Utara	Wisata Alam/ Geopark Tiwi Gui Kea	1	Memperbarui

11.	Wolojita	Wolojita	Wisata Budaya Kampung Adat Wolojita		
		Nggela	Wisata Budaya Kampung Adat Nggela	1	Memperbarui
			Wisata Minat Khusus/ Geopark Mata Air Panas Ae Wau Nggela	2	Memperbarui
12.	Maurole	Aewora	Wisata Alam Pantai Nangawuru	2	Diadakan 2020
		Otogedu	Wisata Minat Khusus Kerajinan Tradisional Pembuat Moke/Arak	1	Memperbarui

		Detuwulu	Wisata Minat Khusus Kerajinan Tradisional Pembuat Moke/Aarak	1	Memperbarui
13.	Kotabaru	Kotabaru	Wisata Alam Panorama Bukit Lia Ga	1	Memperbarui
		Tiwusora	Wisata Alam Danau Tiwu Sora		Memperbarui
14.	Nangapanda	Uzuzozo	Wisata Alam Panorama Alam Tiwu Ape	1	Memperbarui
		Raporendu	Wisata Geologi/Geopark Pantai Batu Cincin Mbewe	1	Diadakan 2022

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Ende

Kerja sama yang dibangun oleh Dinas Pariwisata bersama masyarakat setempat, mampu menjadikan semua keunggulan dengan keunikan spotnya masing-masing. Peninjauan yang dilakukan Dinas pariwisata merupakan salah satu langkah strategis dalam menentukan destinasi keunggulan wisata disuatu tempat, dengan ditetapkan surat keputusan Bupati Ende Nomor 14/KEP?HK/2025 tentang penetapan objek dan daya tarik wisata Kabupaten Ende. Berdasarkan tabel 4.9 terkait Penetapan Objek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Ende, menjelaskan bahwa terdapat 14 kecamatan yang dibagi dalam 33 Desa/Kelurahan, setiap kecamatan dan desa memiliki keunggulan yang menjadi spot wisata, seperti wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus. Ketersediaan toilet disetiap objek wisata merupakan langkah baik demi menjaga kemanan wisatawan yang berkunjung. Pengembangan yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Ende melalui strategi memberi nilai tambah pada; Situs Pengasingan Bung Karno dengan menghadirkan pagar keliling, cafe sumur, pada Taman Renungan Bung Karno membangun cafe, dan penataan kolam disekitaran patung Bung Karno. Selanjutnya kampung adat wolotopo dengan menghadirkan Cafe, Benteng Marilonga dan Makam Marilonga membangun cafe. Kampung Adat Watunggere, Saga dan Sipijena dengan membangun Cafe. Danau Kelimutu menghadirkan Cafe dan ketersediaan kuda untuk menunggang bagi wisatawan. Pengembangan dilakukan dengan metode memperbaharui sebanyak 36 spot wisata, dalam pengembangan tersebut melalui strategi perbaikan tempat parkir, toilet dan jalan menuju spot wisata. Pengembangan yang dilakukan dengan metode mengadakan sebaganyak 24 lokasi wisata, langkah strategis Dinas Pariwisata bersama masyarakat setempat yang menilai kelayakan pada spot wisata baru dengan tujuan membuka usaha bagi masyarakat sebagai sumber pendapatan

ekonomi. Komitmen yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ende melalui Kepala Sub Bagian pengembangan destinasi merupakan langkah strategis dalam melakukan pengembangan destinasi di Kabupaten Ende.

Tentunya penentuan dan pengembangan bidang destinasi mengalami beberapa kendala dalam lingkup internal dinas dan masyarakat. Berdasarkan wawancara peneliti bersama Ibu Patrisia Diana Mbenggu selaku kepala bidang destinasi menjelaskan bahwa;

“Bagian destinasi pariwisata, kami melakukan pengembangan, peningkatan destinasi wisata, mengelolah destinasi wisata, termasuk dalam pengelolaan infrastruktur, fasilitas, dan lingkungan. Pengembangan dilakukan dengan metode menghadirkan tempat wisata baru, memperbarui tempat wisata, dan memberi nilai tambah pada spot wisata yang ada. Pengembangan terus berjalan karena kekayaan tempat yang dijadikan spot wisata di Kabupaten Ende. Tugas pendukung kami, untuk mengumpulkan data atau informasi tentang destinasi wisata, seperti data kunjungan dan pendapatan, menganalisis data terkait peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata, mengembangkan kerja sama (stakeholder, pemerintah, dan masyarakat) dan mengawasi program-program. Kendala kami dibidang destinasi dapat dilihat dari kendala aksesibilitas, kendala infrastruktur, kendala lingkungan, kendala kualitas pelayanan, kendala sosial budaya, kendala ekonomi, dan kendala teknologi” (wawancara 05/02/2025).

Berdasarkan temuan penulis pada pengembangan pariwisata bidang destinasi Kabupaten Ende bahwa pengembangan destinasi dibagi dalam wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus. Ketersediaan spot wisata alam, sejarah dan minat khusus memiliki daya tarik atau spot dengan keunggulan yang berbeda dari spot lainnya. Keunggulan masing-masing objek wisata menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung. Untuk menciptakan kenyamanan bagi wisatawan, keberadaan setiap destinasi

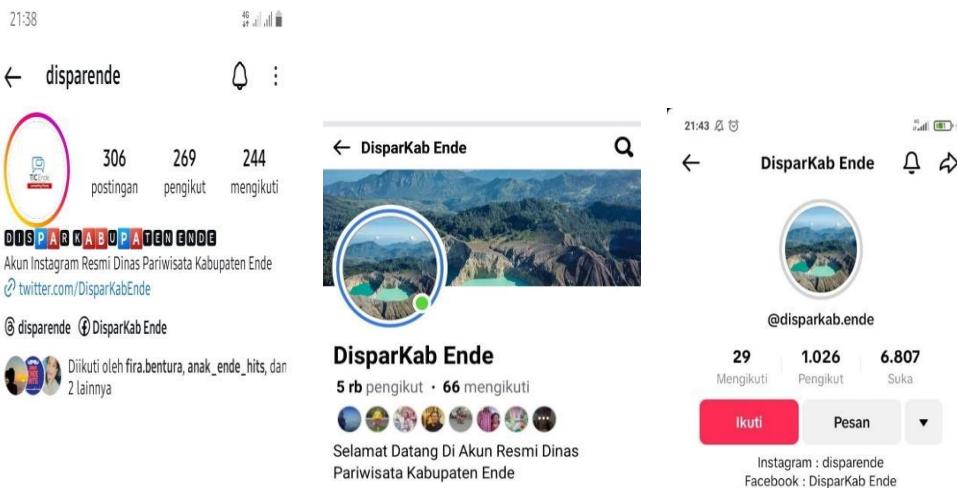
didukung dengan tempat akomoditas lainnya seperti; penginapan dan rumah makan. Pengembangan kepariwisataan pada bidang destinasi berdasarkan kerja sama bersama masyarakat. Dengan kerja sama tersebut menciptakan sasaran atau strategi pariwisata jangkah panjang secara berkelanjutan. Pengembangan tetap menerapkan sistem pelestarian budaya dan lingkungan pada daerah setempat.

D. Pengembangan Bidang Pemasaran dan Promosi

Pentingnya bidang pemasaran dan promosi dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan kreativitas yang baik terhadap objek wisata. Setelah penulis melakukan observasi pada tanggal 30/01/2025 menemukan bahwa terdapat akun media sosial yang dimiliki Dinas Pariwisata Kabupaten Ende seperti facebook, instagram, dan tiktok sebagai salah satu strategi promosi kepariwistaan daerah. Bentuk promosi lainnya seperti flayer, brosur, flayer kebangsaan dan bentuk kerja sama dengan lembaga pengelolaan kepariwisataan Labuan Bajo. Pengembangan dilakukan dengan cara mengadakan akun fecebook pada Tahun 2022, akun instagram pada Tahun 2022, dan akun tiktok pada Tahun 2024. Pengembangan keterampilan bidang promosi dilakukan oleh Dinas Pariwisata dengan melibatkan semua perwakilan pengelola disetiap objek wisata. Strategi tersebut dengan mengadakan akun media sosial dengan sitstem jangkah panjang dan berkelanjutan. Tentunya adanya media sosial membutuhkan keterlibatan dan kerja sama bersama masyarakat sehingga mampu membagikan postingan promosi kepariwisataan di Kabupaten Ende.

Gambar 4.3

Pengadaan Akun Media Sosial Dinas Pariwisata Kabupaten Ende



*Sumber: Dokumentasi
Penulis*

Berdasarkan gambar 4.3 di atas menjelaskan bahwa terdapat 3 akun media sosial yang dimiliki Dinas Pariwisata Kabupaten Ende seperti; Facebook, Instagram, dan Tiktok. Ketiga akun tersebut sebagai media informasi dan promosi kepada setiap wisatawan. Akun yang dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata tersebut memiliki keterbatasan akses dikarenakan jumlah pertemanan dan pengikut yang tidak memiliki angka besar.

Gambar 4.4

Kerja Sama Promosi Kepariwisataan Ende



Sumber: Dokumentasi Dinas Pariwisata Kabupaten Ende

Gambar 4.4 di atas menjelaskan bahwa kegiatan promosi yang dilakukan Dinas Kepariwisataan Kabupaten Ende bersama lembaga Agustine Phinisi Labuan Bajo, kerja sama dan promosi dilakukan di Labuan Bajo yang kaya akan spot wisata dan peningkatan jumlah pengunjung, Labuan Bajo sendiri dikenal dengan wisata super premium yang mempunyai spot wisata yang baik, sehingga kerja sama tersebut dengan tujuan adanya promosi pihak pengelola pariwisata Labuan Bajo kepada wisatawan yang berkunjung terkait kepariwisataan di Kabupaten Ende. Dokumentasi diatas menunjukan salah satu karyawan di Dinas Pariwisata Kabupaten Ende bersama staf lembaga Agustine Phinisi Labuan Bajo, kerja sama untuk mempromosikan kepariwisataan Kabupaten Ende tersebut merupakan salah satu strategi dimulai Tahun 2023.

Gambar 4.5 **Promosi Festivals Budaya**



Sumber; Dinas Pariwisata Kabupaten Ende

Gambar 4.5 di atas menjelaskan bahwa salah satu bentuk promosi kepariwisataan Kabupaten Ende dilakukan pada saat festival Budaya, festival budaya dilakukan setiap Tahun tepatnya dalam parade kebangsaan yang sering dilakukan setiap tanggal 29 dan 30 Mei. Penyelenggaraan kegiatan tersebut dengan melibatkan semua unsur di Kabupaten Ende, flayer yang terdapat pada gambar diatas menunjukan bentuk kegiatan promosi yang dilakukan Dinas Pariwisata seperti; stratt muziek, pamerak arsitektur, kelas masak, kelas tenun, kelas anyam, photo booth pakayan adat, pameran ekraf, dan permainan rakyat. Strategi tersebut dengan tujuan memnuhi pengetahuan masyarakat luas terkait keunikan dan tawaran paket wisata yang berkualitas bagi wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Ende.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Viktor Pera kepala bidang pemasaran dan promosi menjelaskan bahwa;

“Bagian pemasaran dan promosi menjadi penting karena berdampak pada jumlah pengunjung, kami selalu menyiapkan strategi pemasaran untuk meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan, mengelola sistem promosi melalui berbagai media, mengembangkan materi promosi seperti flayer dan brosur. secara online kami menggunakan media. Kami melakukan pengadaan media sebagai salah satu langkah promosi. Media yang sering kami gunakan seperti facebook, instagram, dan tiktok. Bentuk promosi lainnya, kami menempatkan sebagian tenaga kerja kami di Bandara dan Pelabuhan untuk memberikan promosi dan tawaran agenda wisatawan bagi yang berdatangan di Kabupaten Ende. Dalam parade kebangsaan yang sering dilakukan setiap tanggal 29 dan 30 Mei menjadi salah satu strategi promosi kepada wisatawan, vestival kelimutu yang melibatkan semua elemen untuk mengajak melakukan promosi kepariwisataan Kabupaten Ende, sehingga mengetahui bahwa Ende mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Promosi musik tradisional pada

setiap even kabupaten seperti; Turmanen Bupati Cup dan agenda seminar pada umumnya di Kabupaten Ende. Kendala yang sering kami hadapi kurang lebih 10 Tahun berjalan ini, adalah kelemahan pada Aparatur Sipil Negara yang tidak secara ekstra dalam melakukan promosi dan tawaran kepada wisatawan. Kendala lainnya adalah Kami tidak mempunya website khusus dalam melakukan pelayanan kepariwisataan secara online kepada wisatawan, sehingga minimnya informasi detail kepada wisatawan terkait model kepariwisataan Ende secara keseluruhan” (wawancara tanggal 07/02/2025)

Pengembangan kepariwisataan daerah Kabupaten Ende pada bidang promosi dan pasaran, didukung dengan strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata melalui brosur, iklan, even, dan kerja sama dengan pihak pengelolaan pariwisata Labuan Bajo. Strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata merupakan langkah aktif dalam memperkenalkan spot dan objek wisata yang dimiliki Kabupaten Ende, dalam melakukan promosi akun media sosial juga digunakan oleh Dinas Pariwisata seperti facebook, instagram, dan tiktok. Hanya dalam promosi melalui media sosial dengan pengikut dan pertemanan yang masih minim berdampak kurang signifikan terhadap nilai jual kepariwisataan daerah Kabupaten Ende. Kabupaten Ende sendiri tidak mempunyai website khusus untuk digunakan dalam sistem pelayanan secara online. Hal tersebut menimbulkan permasalahan dalam mengetahui atau menjangkau objek wisata oleh wisatawan. Even yang dilakukan dengan melibatkan semua elemen masyarakat dengan tujuan mengajak masyarakat untuk membantu melakukan promosi kepariwisataan Kabupaten Ende sehingga bisa diketahui dan dikunjungi para wisatawan, hal tersebut dilakukan dengan tujuan menerapkan sistem pengelolaan kepariwisataan jangka panjang.

E. Pengembangan Bidang Kelembagaan

Berdasarkan hasil obesrvasi peneliti pada tanggal 29/01/2025 menemukan bahwa pelaksanaan rencana induk kepariwisataan pada bidang kelembagaan kepariwisataan Kabupaten Ende bahwa bidang kelembagaan memiliki peran dan fungsi sebagai penyediaan layanan administrasi kepariwisataan dengan menetapkan surat keputusan melalui jalur peninjauan yang dilakukan tim di lapangan. Pengadaan surat keputusan dengan syarat kelayakan administrasi terhadap desa wisata yang memiliki daya tarik tersendiri dan pokdarwis sebagai pengelola dalam membantu pemerintah dalam mengelola pariwisata, keputusan tersebut dibuat dalam bentuk surat keputusan (SK) dari Bupati Ende, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, Kepala Desa dan Lurah. Keputusan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengeluarkan surat keputusan terhadap legalitasnya desa wisata dan pokdarwis berdasarkan standar penilaian yang layak. Standar penilaian sebelum pemerintah menetapkan Surat Keputusan Desa Wisata meliputi aspek potensi wisata, keberlanjutan pengelolaan, dan partisipasi masyarakat setempat. Pengukuran dilakukan melalui evaluasi terhadap daya tarik wisata, fasilitas yang tersedia, serta kesiapan sumber daya manusia. Proses penilaian tersebut bertujuan memastikan desa wisata memenuhi kriteria pengembangan yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut data desa wisata yang dikeluarkan surat keputusan melalui Bupati, dan Kepala Dinas Pariwisata.

Tabel 4.9
Data Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Ende

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Nama Desa Wisata	SK Desa Wisata	Potensi Desa	Kategori		
						Mandiri	Berkembang	Embrio
1.	Kelimutu	Desa Koanara	1. Moni	Kep. Bupati Ende No.301/KEP/HK/2020	Air terjun Murundao, kampung adat Koanara, Kampung Adat Wetugana	✓		
		Desa Pemo	2. Pemo	Kep. Bupati Ende No.301/KEP/HK/2020	Danau Kelimutu, Kampung adat Pemo		✓	
		Desa Waturaka	3. Waturaka	Kep. Bupati Ende No.301/KEP/HK/2020			✓	
		Desa Woloara	4. Woloara	Kep. Bupati Ende No.301/KEP/HK/2020			✓	
		Desa Woloara Barat	5. Woloara Barat	-				✓
2.	Detusoko	Kelurahan Detusoko	6. Detusoko	-	Kolam Air Panas, Gua Maria, Bangunan Gereja tua, sawah beringkat			✓
		Desa Detusoko Barat	7. Detusoko Barat	Kep. Bupati Ende No.301/KEP/HK/2020	Agro wisata,, sawah beringkat		✓	
		Desa Wolotolo Tengah	8. Wolotolo Tengah	-	Kampung adat, belut		✓	
		Desa Wologai Tengah	9. Wologai Tengah	Kep. Bupati Ende No.301/KEP/HK/2020	Kampung adat, camping ground, hutan adat, kolam pemancingan		✓	
		Desa Saga	10. Saga	Kep. Bupati Ende No.301/KEP/HK/2020	Kampung adat, ritual adat "Nggua"			✓
		Desa Sipijena	11. Sipijena	Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Nomor Par.754.4/26/II/2023	Kampung adat, ritual adat "Nggua", sawah beringkat			✓
3.	Ndona	Desa Wolotopo Timur	12. Wolotopo	Kep. Kepala Dinas Pariwisata No. Par 754.4/10/VII/2021	Kampung adat, panorama pantai		✓	

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Nama Desa Wisata	SK Desa Wisata	Potensi Desa	Kategori		
						Mandiri	Berkembang	Embrio
4.	Wolojita	Desa Nggela	13 Radaara	Kep. Kepala Dinas Pariwisata No. Par.754.4/26/II/2023	Kampung adat, proses pembuatan tenun ikat	✓	✓	
5.	Ende Timur	Kelurahan Rewarangga	15 Nggela	Kep. Bupati Ende No.301/KEP/HK/2020	Air Panas Ae Wau, air terjun Ae Bai'i, air terjun ae Wala, kampung adat, tarian mure, proses tenun ikat	✓		
6.	Detukeli	Desa Watunggere Marilonga	17 Watunggere	Kep. Kepala Dinas Pariwisata No. Par. 754.4/21/XII/2022	Benteng Marilonga, kampung adat		✓	
7.	Ende	Desa Tonggopapa	18 -	Kep. Kepala Dinas Pariwisata No. Par. 754.4/26/II/2023	Air terjun Mbu'U		✓	
8.	Nangapanda	Watumite	19 -	Kep. Kepala Dinas Pariwisata No. Par. 754.4/26/II/2023	Panorama, kampung adat, air terjun, trekking		✓	
9.	Pulau Ende	Desa Paderepe	20 -	Kep. Kepala Dinas Pariwisata No. Par. 754.4/26/II/2023	Bekas benteng peninggalan Portugis, Bukit Emburambotu, panorama pantai		✓	
		Desa Redodori	21 -	Kep. Kepala Dinas Pariwisata No. Par.754.4/26/II/2023	View alam laut, pantai, mancing		✓	

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Nama Desa Wisata	SK Desa Wisata	Potensi Desa	Kategori		
						Mandiri	Berkembang	Embrio
		Desa Rendorterua	22	Kep. Kepala Dinas Pariwisata No. Par.754.4/26/II/2023	View alam laut, panorama pantai, mancing, pembuatan perahu/ dayung/sampan			✓
		Desa Roruranga	23	Kep. Kepala Dinas Pariwisata No. Par.754.4/26/II/2023	View alam laut, panorama pantai, pembuatan perahu/ dayung/ sampan			✓

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Ende

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menjelaskan bahwa terdapat 23 Desa Wisata yang tersebar di 9 Kecamatan di Kabupaten Ende, pengelolaan desa wisata dilakukan oleh masyarakat dan Pokdarwis setempat. Terdapat 1 kategori Desa Wisata mandiri, 11 Desa Wisata Embrio, dan 11 Desa Wisata dengan kategori berkembang. Desa wisata mandiri adalah desa yang mengembangkan potensi wisatanya secara mandiri dengan memperdayakan masyarakat lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada, Desa Wisata berkembang adalah desa yang memiliki potensi wisata yang signifikan yang sedang dalam tahap pengembangan di berbagai bidang pembangunan, sedangkan Desa Wisata embrio adalah desa yang memiliki potensi wisata yang belum dikembangkan yang baik, dan memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik untuk meningkatkan potensi wisatanya. Legalitas Desa Wisata melalui surat Keputusan Bupati sebanyak 8 SK, Keputusan Kepala Dinas sebanyak 12 SK, dan yang belum memiliki SK sebanyak 3 desa wisata. Pengadaan Surat Keputusan tersebut berawal Tahun 2020 hingga Tahun 2023.

Tabel 4.9
Data Pengadaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Nama Pokdarwis	NO. SK POKDARWIS
1	Kelimutu	1. Desa Koanara	Koanara	Kep. Bupati Ende No.302/KEP/HK/2020
		2. Desa Pemo	Pemo	Kep. Bupati Ende No.302/KEP/HK/2020
		3. Desa Waturaka	Waturaka	Kep. Bupati Ende No.302/KEP/HK/2020
		4. Desa Woloara	Woloara	Kep. Bupati Ende No.302/KEP/HK/2020
		5. Desa Woloara Barat	Woloara Barat	Kep. Bupati Ende No.302/KEP/HK/2020
2	Denusoko	6. Desa Detusoko Barat	RMC	Kep. Bupati Ende No.302/KEP/HK/2020
		7. Desa Wolotolo Tengah		Kep. Bupati Ende No.302/KEP/HK/2020
		8. Desa Wologai Tengah	Pu'U Tubu	Kep. Bupati Ende No.302/KEP/HK/2020
		9. Desa Saga	-	Kep. Bupati Ende No.302/KEP/HK/2020
3	Wolojita	11. Desa Nggela	Nggela Exotic	Kep. Bupati Ende No.302/KEP/HK/2020
4	Ende Timur	12. Kelurahan Rewarangga	Rewarangga	Kep. Lurah Rewarangga No.05 / 2021
5	Ndona	10. Desa Wolotopo Timur	Besu Nusa	Kep. Kepala Desa Wolotopo Timur No.14 Tahun 2021
6	Detukeli	13. Desa Watunggere Marilonga	Watunggere	Kep. Kepala Desa Watunggere Marilonga No.6 Tahun 2023

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Ende

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dijelaskan bahwa data kelompok sadar wisata (Pokdarwis) merupakan lembaga pengelolaan objek wisata yang ada di Kabupaten Ende, berdasarkan daerahnya masing-masing. Terdapat 6 Kecamatan dibagi dalam 13 Desa yang memiliki kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata sendiri dikenal sebagai lembaga dengan legalitas jelas berdasarkan surat keputusan Bupati Ende, Lurah dan Kepala Desa setempat. Komitmen penyelenggaran dan pengembangan pariwisata merupakan misi utama dari kelompok sadar wisata. Pengadaan melalui surat keputusan tersebut dilakukan pada Tahun 2020 hingga Tahun 2023, dalam

penetapan melalui surat keputusan Bupati Ende, Lurah dan Kepala Desa. Sebanyak 10 surat keputusan yang dikeluarkan Bupati Ende, 2 keputusan Kepala Desa dan 1 keputusan Lurah.

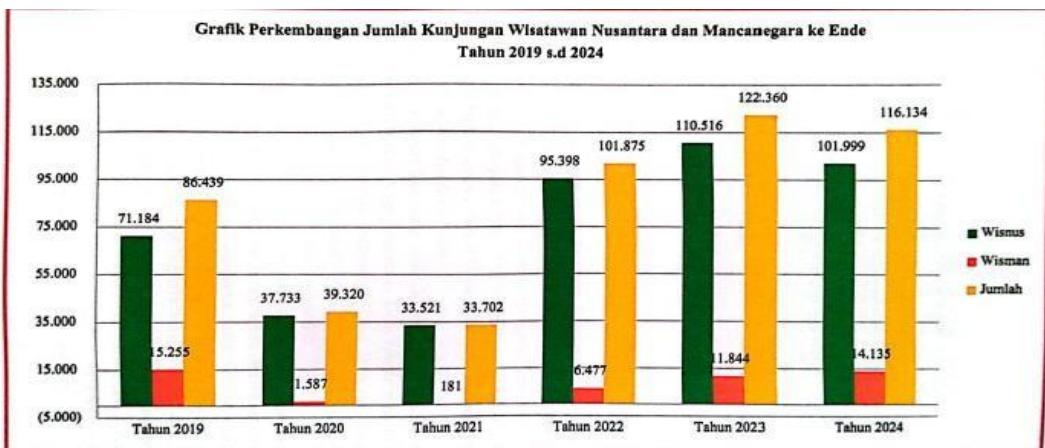
Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Rosalia Juditia Embu Rae yang mewakili kepala bagian kelembagaan pariwisata menjelaskan bahwa;

“Kelembagaan merupakan sumber administrasi terkait dengan legalitas sebuah kepariwisataan di daerah, kami di bagian kelembagaan selalu menjelaskan terkait standar kepariwisataan, peluang dan tantangan, termasuk strategi terkait pembentukan desa wisata, dan melakukan kordinasi terhadap kaum akademisi dalam memberikan pendampingan terkait kepariwisataan daerah, sejauh ini keputusan sudah ada melalui surat keputusan Bupati Ende, Dinas Pariwisata yang dalam membuat keputusan selalu melakukan kordinasi terhadap kami di bagian kelembagaan. Keputusan terhadap desa wisata dan pokdarwis sangatlah penting dikarenakan surat keputusan adalah salah satu cara legalitasnya suatu tempat wisata atau pengelola. Terdapat 13 pokdarwis yang ditetapkan untuk mengelola melalui surat keputusan, dan 23 Desa Wisata yang tersebar di 9 Kecamatan di Kabupaten Ende, Legalitas Desa Wisata melalui surat Keputusan Bupati sebanyak 8 SK, Keputusan Kepala Dinas sebanyak 12 SK, dan yang belum memiliki SK sebanyak 3 desa wisata. Pengadaan Surat Keputusan tersebut berawal Tahun 2020 hingga Tahun 2023” (wawancara tanggal 03/02/2025).

Grafik 4.1

Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara ke Kabupaten Ende Tahun 2019-2024

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Ende



Berdasarkan grafik 4.1 di atas menjelaskan bahwa realisasi presentase peningkatan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dari Tahun 2019-2024. Meskipun mengalami penurunan di Tahun 2020 (39.320 orang) dan 2021 (33.702 orang) akibat pandemik covid-19, namun tren kunjungan wisatawan mulai meningkat pasca pandemik. Selanjutnya pada Tahun 2022 berjumlah 101.875 kunjungan, Tahun 2023 sebanyak 122.360 kunjungan dan mengalami penurunan Tahun 2024 sebanyak 116.314 kunjungan.

Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Ende dilakukan berdasarkan kerja sama bersama masyarakat. Penulis melakukan wawancara bersama Bapak Emanuel Mari selaku tokoh masyarakat yang berlatar belakang aktivis menyampaikan bahwa;

“pengembangan kepariwisataan terdapat 4 aspek utama seperti industri, destinasi, promosi, dan kelembagaan. Pengembangan dilakukan bersama masyarakat sebagai

pengelolah utama. Pengembangan dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan strategi sistem kepariwisataan jangkah panjang secara berkelanjutan, dengan memperhatikan pelestarian budaya dan lingkungan setempat” (wawancara tanggal 07/02/2025).

Pengembangan kepariwisataan daerah Kabupaten Ende pada bidang kelembagaan bahwa keberpihakan terhadap pengelolaan administrasi parwisata sangatlah signifikan melalui upaya pemerintah daerah untuk mengadakan surat keputusan. Pengadaan surat keputusan merupakan perbuatan pemerintah yang bertanggungjawab atas tugas dan fungsi sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan wisata. Pengadaan surat keputusan membuat pokdarwis dan pengelolah mendapatkan legalitas dalam urusan wisata. Keberpihakan pemerintah melalui pengadaan surat keputusan bertujuan untuk menjaga legalitas tata kelola kepariwisataan jangkah panjang dan berkelanjutan. Keterlibatan semua pihak dalam urusan kelembagaan menjadi penting dalam membuat analisis surat keputusan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Ende dalam bidang kepariwisataan menunjukkan komitmen dan upaya strategis melalui dokumen perencanaan yang komprehensif, meliputi pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, pengembangan keterampilan, dan penguatan jaringan kerja sama dengan institusi seperti UGM dan swasta. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kapasitas aparatur desa dan kecamatan. Upaya yang dilakukan telah menghasilkan berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan ekonomi kreatif yang melibatkan pelaku lokal, pelajar, dan komunitas desa, namun keberhasilannya masih perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada pariwisata. Secara umum, strategi pengembangan SDM di Kabupaten Ende telah berjalan sesuai rencana, namun keberlanjutannya dan efektivitasnya memerlukan peningkatan kapasitas aparatur dan edukasi masyarakat secara menyeluruh agar mampu menghadapi berbagai tantangan dan mengoptimalkan potensi kepariwisataan secara berkelanjutan.

Perkembangan industri pariwisata di Kabupaten Ende menemukan bahwa komitmen dan upaya strategis dalam meningkatkan fasilitas akomodasi, makanan, agen perjalanan, dan transportasi wisata yang berkelanjutan serta berbasis budaya lokal, dengan dukungan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Meski demikian, masih terdapat berbagai kendala seperti infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan sumber daya manusia

yang kompeten, serta minimnya inovasi dan promosi yang efektif, yang menghambat peningkatan kualitas dan daya saing industri. Pengembangan industri berjalan sesuai rencana melalui peningkatan fasilitas, pembaharuan, dan pemberian nilai tambah pada tempat penginapan serta objek wisata, namun implementasinya masih belum optimal, terutama dalam hal diversifikasi produk, teknologi modern, dan pemasaran internasional.

Pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Ende menunjukkan keberhasilan dalam memperkuat potensi keunikan dan keunggulan setiap lokasi melalui kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan swasta, dengan fokus pada wisata alam, budaya, dan minat khusus yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan dan pembaharuan fasilitas, penataan lingkungan, serta penambahan daya tarik seperti cafe, toilet, dan spot wisata baru yang berorientasi pada pelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun menghadapi tantangan seperti aksesibilitas, infrastruktur, dan kendala sosial ekonomi, langkah strategis pengelolaan destinasi secara berkelanjutan tetap menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisata, memperluas daya saing, serta mendukung perekonomian lokal. Keberhasilan pengembangan ini didukung oleh sistem kerja sama yang solid dan pelaksanaan pengelolaan yang terintegrasi, sehingga potensi destinasi di Kabupaten Ende dapat optimal dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Strategi promosi dan pemasaran kepariwisataan Kabupaten Ende telah dilakukan melalui media sosial, kerja sama promosi di Labuan Bajo, dan festival budaya, namun masih menghadapi kendala

seperti minimnya pengikut media sosial dan belum adanya website resmi yang menghambat akses informasi serta jangkauan promosi yang efektif. Untuk meningkatkan daya saing dan kunjungan wisatawan, diperlukan penguatan sistem promosi digital yang terintegrasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemasaran jangka panjang secara berkelanjutan.

Pengembangan kelembagaan kepariwisataan di Kabupaten Ende dilakukan melalui pemberian legalitas berupa surat keputusan dari pemerintah kepada desa wisata dan pokdarwis, yang berfungsi sebagai dasar pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata secara berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar desa wisata dan pokdarwis telah memperoleh legalitas resmi, meskipun masih ada yang belum memiliki SK, serta pengakuan terhadap standar potensi dan keberlanjutan pengelolaan. Dukungan pemerintah melalui proses legalisasi ini penting untuk memastikan pengelolaan wisata yang terorganisasi, partisipatif, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dan wisatawan terhadap potensi pariwisata Kabupaten Ende.

D. SARAN

1. Diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur, pengembangan inovasi dan pemasaran digital yang efektif.
2. Peningkatan sistem kelembagaan dan legalitas pengelolaan destinasi wisata secara terpadu dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ajif, Pradita. 2013. "Pola Jaringan Sosial pada Industri Kecil Rambut Palsu di Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga." *Jurnal Penelitian*: 31–40. <https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB III 09.10.033 Aji p.pdf>.
- Ana Antonius, Marianus, , Endang Indartuti, dan Rachmawati Novaria. 1945. "Analisis Peran Dinas Pariwisisata Dalam Pengembangan Destinasi Wisata di Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur."
- Aryani, Maura Dyan Septa. 2021. "Partisipasi Masyarakat, Kompetensi, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul." (2013): 1–23.
- Ati, N. D. (2024). Peran pemerintah terhadap pengembangan industri pariwisata Pantai Pasir Putih Kabupaten Belu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(04), 136. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Cemporaningsih, Esti, Destha Titi Raharjana, dan Janianton Damanik. 2020. "Ekonomi Kreatif sebagai Poros Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Kledung dan Bansari, Kabupaten Temanggung." *Jurnal Nasional Pariwisata* 12(2): 106.
- Darwis, Valeriana, Endang Lestari Hastuti, dan Supena Friyatno. 2016. "Revitalisasi Kelembagaan Kemitraan Usaha dalam Pembangunan Agribisnis Hortikultura di Provinsi Sumatera Utara." *Forum*

penelitian Agro Ekonomi 24(2): 123.

Daya, Pengaruh et al. “Pengaruh Daya Tarik Wisata Terhadap Niat Kunjung Kembali Dengan Kepuasan Wisatawan Sebagai Variabel Intervening Pada Objek Wisata Pantai Menganti Kebumen (Amelia Putri).”

Djaenuri, Aries. 2015. “Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah.” *Repository.Ut.Ac.Id* 3: 1–46.
<http://repository.ut.ac.id/4206/1/IPEM4214-M1.pdf>.

Fish, Base. 2020. “Peran Dinas Pariwisata Dalam Pembangunan Destinasi Pariwisata Di Kecamatan Ndona Kabupaten Ende Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 – 2034.” 2507(February): 1–9.

Heriyani Hj. Agustina, Dra., MM., M.S. Isu Pembangunan. Perbedangan Teori Pertumbuhan Ekonomi W.W. Rostow Dengan Terori Modernisasi Dan Teori Depedensi, (Dosen). (2017/2018).

Mizan. 2013. “Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Menuju Masyarakat Industrial Pancasila.” *Jurnal Ilmiah*: 10–35.

Motoh, fabiola grasella, Alden Laloma, dan very y. Londa. 2021. “Pengembangan Pariwisata Di Kota Tomohon.” *Jurnal Administrasi Publik* 7(99): 49.

MR, Hasan. 2022. “Metodologi Penelitian: Metodologi penelitian Skripsi.” *Rake Sarasin*: 51.

Mulyadi, M., Puji Lestari, T. R., Alawiyah, F., Wahyuni, D., Astri, H., Martiany, D., Rivani, E., & Qodriyatun, S. N. (2015). Pembangunan berkelanjutan: Dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI; Azza Grafika.

Nandi, Nandi. 2016. “Pariwisata Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.” *Jurnal Geografi Gea* 8(1): 33–42.

Nugroho, Y. (2012). Pemerintah Daerah: Konsep dan Implementasi. Jakarta: Rajawali Pers.

Nurhidayat, Ipan. 2023. “Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia.” *Journal E- Gov Wiyata : Education and Goverment* 1(1): 40–52. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-govHalaman40>.

Oktaviani, Agnesia Berlina, dan Eppy Yuliani. 2023. “Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat.” *Jurnal Kajian Ruang* 3(1): 1.

Permatasari, Indah. 2022. “Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) di Bali.” *Kertha Wicaksana* 16(2): 164–71.

Pipit Mulyiah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. 2020. “濟無No Title No Title No Title.” *Journal GEEJ* 7(2): 9–44.

Prof.Dr. Veithzal Rivai Zanal, S.E., M.M., MBA. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia.*

Ramadhan, Ruslan. 2024. "in Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur." *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik* 6(1): 55–67.

Rosika, Citra, dan Aldri Frinaldi. 2023. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Padang." *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development* 2(09): 1902–8.

Ruslan Diwiryo. 1980. "BAB II - Tata Ruang." *Journal of Chemical Informationand Modeling* 53(9): 21–25. <http://www.elsevier.com/locate/scp>.

Fasenfest, D. (2010). Government, governing, and governance. *Critical Sociology*, 36(6), 771–774. <https://doi.org/10.1177/0896920510378192>

Faizal. (2023). Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Batubara No. 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2014 – 2029 (Studi Pengembangan Pariwisata Pantai Sejarah Berbasis Masyarakat dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batubara) (Tesis). Universitas Medan Area, Medan.

Ginting, A. H., Data Wardana, & Zainal, Z. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Universitas Islam Riau

- Nuryananda, P. F., Mijarto, J., Alawi, A. M., & Wahyuni, W. (2023). Desa Wisata Tegaren: Sadewa, Jadesta, Adwi dan Persepsi Sosial Publik Terhadap Kemajuan Desa Wisata. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
- Sahdan, G., Pradhanawati, A., Yuwono, T., & Yunanto, S. E. (2024). Governing The Power Of Neoliberalism Government With People's Economics In The Welfare Of The Community (Study Of People-Owned Shops Or Tomira In Kulon Progo District, Yogyakarta Special Region, Indonesia). *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2778. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2778>
- Setiawan, Ika Roni. 2016. "Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang." *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan* 1(1): 24. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/penataran/article/view/301>
- Santoso, L., Cahyani, Y. T., & Suryani, S. (n.d.). (2020) Dilema Kebijakan Wisata Halal di Pulau Lombok. Dokumen tidak diterbitkan. Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Malikussaleh Lhokseumawe
- Setya, Mayang Vini. 2017. "Semarang Dalam Upaya Mengembangkan Pariwisata Kota Semarang." *journal of Politics and Government Studies* 6: 410–401.

- Sinaga, Kariaman, M. Amri Nasution, dan Ayu Trisna Dewi. 2021. “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.” *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 8(1): 79–90.
- Siswoyo, M., Komara, A., Siddiq, D. M., Putra, Y. P., & Lestari, I. (2022). Social learning theory dalam pemodelan pengembangan wisata embung Sarwadadi Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. *Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, 6(2), 189–202.
- Studi, Program, Administrasi Publik, Universitas Sultan, dan Ageng Tirtayasa. 2025. “Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kepariwisataan Kabupaten Pandeglang.”
- Sulistiany, Ambar Teguh. 2004. “Pengertian good governance.” *Ekonomi* 02(Konsep Kemitraan): 16–49.
- Susanto, Bambang Sujagad. (2015). Penyerapan Tenaga Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Upah Minimum di Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Management*, STIE La Tansa Mashiro, Rangkasbitung
- Syahir, AhmadJainuri, M. (2016). Pembelajaran Konvensional. *Matedukasia*, III(2), 25–30.
https://www.academia.edu/6942550/Pembelajaran_Konvensional. 2017. “Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka.” *Convention Center Di Kota Tegal* 4(80): 4.

- Swanson, R. A., & Holton, E. F. (2001). Foundations of Human Resource Development. Berrett-Koehler Publishers
- Tambaru, Rahmadi. 2022. "Kajian Atas Strategi Pengembangan Pariwisata pada Era New Normal di Tana Toraja." *Seminar Nasional Hasil Penelitian 2022 Membangun Negeri dengan Inovasi tiada Henti Melalui Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat: 1830–48.* <https://ojs.unm.ac.id/semnaslemlit/article/view/40288>.
- Tawai, Andrian, dan Yusuf. 2017. Literacy Institute *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.*
- Thahir, Baharuddin. 2019. "Pemerintah Dan Pemerintahan Indonesia Sebuah Bunga Rampai." *Fisip. Untirta:* 140. <http://fisip.untirta.ac.id>.
- Trisna, Dewi Ade. 2022. *Pengembangan Produk Wisata Trekking Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kawasan Objek WIsata Lubuk Minturun.*
- Utama Ananda Muhamad. 2022. "Peran Dinas Pariwisata Diy Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan." 9: 356–63.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang *tentang Kepariwisataan*, UU No.10 Tahun 2009. Jakarta: Direktorat Jenderal dan HAM
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Pratama, I. W. A. (2023). Pelatihan strategi pemasaran produk UMKM KUBE Saraswati sebagai sarana pemberdayaan masyarakat di desa wisata Jatiluwih, Tabanan-Bali. *Binacipta*, Vol. 2(1), 1. Politeknik Internasional Bali

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014-2034

Wardana, Data; Zainal; & Ginting, Arwanto Harimas. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 211-219.

Wahyuni, Reza Tri, dan Ertien Rining Nawangsari. 2021. “Development of Kampung Wisata Lawas Maspati Surabaya As Tourism Heritage in Good Tourism Governance Perspective.” *Dia* 19(2): 267–81.

Zhang, Yong Jun, Yong Li, dan Xu Chen. 2009. “Dynamic var planning for receiving ends based on evaluation of state division/transition cost.” *Huanan Ligong Daxue Xuebao/Journal of South China University of Technology (Natural Science)* 37(2): 33–45.

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara



Depan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Ende



Wawancara Kepala Bagian Industri



Wawancara Kepala Bagian Destinasi



Wawancara Kepala Bagian Promosi dan Pasaran



Wawancara DPRD Komisi 3



Wawancara Ketua Pokdarwis Desa Wisata Detusoko Barat

PEDOMAN WAWANCARA

Sumber Daya Manusia

Narasumber: DPRD Komisi 3, Kepala Bidang Industri, Destinasi dan Promosi Pasaran

1. Apakah ada dokumen perencanaan pengembangan sumber daya manusia?
2. Apa saja aspek-aspek pengembangan SDM?
3. Apakah masyarakat terlibat sebagai pengelolaan?
4. Apakah terdapat kerja sama dengan pihak luar?
5. Bagaimana sistem ketergantungan masyarakat pada objek wisata kelimutu?
6. Apakah perencanaan pengembangan SDM berdasarkan kebutuhan pengelolah?
7. Apakah ada sistem pengembangan secara berkelanjutan?
8. Apa saja jenis pelatihan yang diberikan kepada pengelola?

Bidang Industri

Narasumber: Kepala Bidang Industri, Destinasi, Promosi dan Pasaran

1. Bagaimana upaya peningkatan fasilitas akomodasi, makanan, agen perjalanan, dan transportasi wisata yang berbasis budaya lokal di Kabupaten Ende hingga saat ini?

2. Apa kendala utama yang dihadapi dalam meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung pertumbuhan industri pariwisata di daerah ini?
3. Apa langkah strategis yang dilakukan dalam melakukan perencanaan pengembangan industri?
4. Bagaimana peran kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam mengatasi tantangan dan mempercepat pengembangan industri pariwisata secara berkelanjutan?

Bidang Destinasi

Narasumber: Kepala Bidang Industri, Destinasi, Promosi dan Pasaran

1. Bagaimana upaya peningkatan destinasi pariwisata di Kabupaten Ende?
2. Apa kendala utama yang dihadapi dalam meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung pertumbuhan destinasi pariwisata di daerah ini?
3. Apa langkah strategis yang dilakukan dalam melakukan perencanaan pengembangan destinasi?
4. Bagaimana peran kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam mengatasi tantangan dan mempercepat pengembangan destinasi pariwisata secara berkelanjutan?

Bidang Promosi dan Pasaran

Narasumber: Kepala Bidang Industri, Destinasi, Promosi dan Pasaran

1. Bagaimana upaya peningkatan promosi dan pasaran kepariwisataan di Ende?
2. Apa kendala utama yang dihadapi dalam meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung pertumbuhan promosi dan pasaran pariwisata di daerah ini?
3. Apa langkah strategis yang dilakukan dalam melakukan perencanaan pengembangan promosi dan pasaran?
4. Bagaimana peran kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam mengatasi tantangan dan mempercepat pengembangan promosi dan pasaran pariwisata secara berkelanjutan?

Bidang Kelembagaan

Narasumber: Kepala Bidang Industri, Destinasi, Promosi dan Pasaran

1. Bagaimana upaya pengembangan kelembagaan kepariwisataan di Kabupaten Ende?
2. Apa kendala utama yang dihadapi dalam meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung pertumbuhan kelembagaan kepariwisataan di Kabupaten Ende?
3. Apa langkah strategis yang dilakukan dalam melakukan perencanaan kelembagaan kepariwisataan di Kabupaten Ende?
4. Bagaimana peran kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam mengatasi tantangan dan mempercepat kelembagaan kepariwisataan di Kabupaten Ende?

Dokumen Pendukung

1. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014-2034.
2. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2023 – 2042.

SURAT SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DINAS PARIWISATA

Jln. Soekarno No.4 Ende Telp (0381) 21303, Pos-el dinasparwisatakab.ende@gmail.com

Ende, 26 Februari 2025

SURAT KETERANGAN PENELITIAN NOMOR : PAR. 556/SEKRET/35/II/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHAMAD SAHAB HS, SH
Jabatan : KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN ENDE

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : John Chrysostomus Sado, S.I.P.
NIDM / NIM : 23610034
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Lembaga : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data skripsi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Ende dengan judul: "Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (Studi Kasus Government Making dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Daerah Kabupaten Ende 2014-2034".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



TANDA CEK PLAGIASI



Lumbung Desa STPMD "APMD"
Perpustakaan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Jl. Timoho 317 Gedoduguman Yogyakarta 55226
Email: perpusapmd@gmail.com telp/WA 0851-7320-3177

TANDA TERIMA CEK PLAGIASI

Tanda terima ini menyatakan bahwa Lumbung Desa Perpustakaan STPMD "APMD" telah menerima makalah anda dan telah memeriksanya melalui perangkat lunak Turnitin dengan rangkuman berikut:

Penulis Makalah : JOHN CHRYSOSTOMUS SADO

Judul Makalah: PELAKSANAAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN ENDE

Tanggal pemeriksaan: 9 Juli 2025

Persentase plagiasi: 12%

Petugas: Checked By:
 Wiji Astuti 